

PENERAPAN ANTI-SUIT INJUNCTIONS SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN DIAJUKANNYA SENGKETA KE PENGADILAN ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL

Cynitiya Scandi Sant
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: cynitiyascandisant@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis permasalahan penerapan anti-suit injunctions sebagai langkah pencegahan diajukannya sengketa ke pengadilan asing dalam arbitrase internasional yang berdasarkan dengan prinsip hukum umum, New York Convention, dan UNCITRAL Model Law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis data logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, permohonan anti-suit injunctions dipengaruhi oleh seat of arbitration (lex loci arbitri) dan exclusive jurisdiction dari perjanjian arbitrase antar-pihak, disertai dengan pendapat para ahli hukum dari kasus terdahulu. Penerapan anti-suit injunctions juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum suatu negara yang mengatur perjanjian antar-pihak. Sehingga, setiap yurisdiksi negara memiliki pertimbangan dan putusan yang berbeda dalam memberikan permohonan anti-suit injunctions. Penelitian ini menganalisis permohonan anti-suit injunctions melalui studi kasus yang dibandingkan dari empat yurisdiksi yang berbeda di bawah sistem hukum common law dan civil law yaitu yurisdiksi Inggris berdasarkan kasus UAU v. HVB; yurisdiksi Amerika Serikat berdasarkan kasus CitiBank, N.A. v. Mazza; yurisdiksi Rusia berdasarkan kasus UralTransMash v. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA; dan yurisdiksi Republik Rakyat Cina berdasarkan kasus Xiaomi v. Inter Digital, Inc.

Kata Kunci: *penerapan anti-suit injunctions, seat of arbitration (lex loci arbitri), exclusive jurisdiction, arbitrase komersial internasional, New York Convention, UNCITRAL Model Law*

Abstract

This research analyzes the problem of implementation of anti-suit injunctions as a measures to prevent disputes from foreign litigation courts in international arbitration based on general law principles, New York Convention, and UNCITRAL Model Law. This research is a normative legal research sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and uses a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research uses library research data collection techniques (library research) with deductive logic data analysis techniques. Based on the research results, the application for anti-suit injunctions is influenced by the seat of arbitration (lex loci arbitri) and the exclusive jurisdiction of the arbitration agreement between the parties, accompanied by the opinions of legal experts from previous cases. The implementation of anti-suit injunctions is also influenced by how the national law regulates the agreement between the parties. Thus, each jurisdiction has different considerations and decisions in granting applications for anti-suit injunctions. This research analyzes applications for anti-suit injunctions through comparative case studies from four different jurisdictions under the common law and civil law legal systems, namely the British jurisdiction based on the case of UAU v. HVB; United States jurisdiction based on the case of CitiBank, N.A. v. Mazza; Russian jurisdiction based on the case of UralTransMash v. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA; and jurisdiction of the People's Republic of China based on the case of Xiaomi v. InterDigital, Inc.

Keywords: *implementation of anti-suit injunctions, seat of arbitration (lex loci arbitri), exclusive jurisdiction, international commercial arbitration, New York Convention, UNCITRAL Model Law*

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya perdagangan internasional selama beberapa tahun terakhir ini memberikan dampak positif bagi dunia bisnis internasional. Dampak positif perdagangan internasional juga dirasakan bagi setiap negara, mulai dari perbaikan neraca pembayaran hingga peningkatan Gross Domestic Product (GDP) suatu negara (Nguyen, 2020: 323-324). Apalagi saat ini seluruh negara mulai memasuki era ekonomi digital. Hal ini tentu saja semakin memudahkan para pelaku usaha di berbagai negara untuk mentransaksikan komoditas perdagangan hingga menanamkan modal usahanya di negara lain yang didukung oleh aturan hukum yang berlaku. Meskipun begitu, para pelaku usaha tetap tidak bisa menghindari adanya potensi sengketa ataupun perselisihan yang muncul dalam perjanjian bisnis antar-mereka. Dalam rangka menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam perdagangan internasional, para pelaku usaha membutuhkan suatu metode penyelesaian sengketa yang adil, cepat, efektif, dan biaya terjangkau dengan tetap menjaga kepercayaan dan profesionalitas dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional secara independen (Karton, 2020: 297).

Arbitrase internasional merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa damai lainnya, arbitrase internasional menggunakan pihak ketiga yaitu arbitrator yang dapat dipilih oleh para pihak. Pada dasarnya, prosedur acara dalam arbitrase internasional dapat dilakukan dengan persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Pemilihan metode arbitrase internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat dilakukan ketika sengketa tersebut telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa tersebut belum lahir. Umumnya, metode arbitrase internasional biasa dipilih untuk menyelesaikan sengketa internasional pada bidang komersial, investasi, keuangan, dan lain-lain.

Perkembangan tren pemilihan arbitrase internasional sebagai metode yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan bisnis internasional dapat dilihat dari hasil survei terhadap 1.000 (seribu) orang dari kalangan penasihat umum dan penasihat senior perusahaan oleh lembaga survei Fortune pada tahun 2011,

yang menunjukkan bahwa arbitrase tetap menjadi salah satu alat utama untuk penyelesaian perselisihan bisnis. Setengah dari penasihat perusahaan yang menanggapi dalam Survei Fortune mengindikasikan bahwa perusahaan mereka kemungkinan akan menggunakan arbitrase untuk penyelesaian sengketa komersial di masa depan. Mengingat keuntungan khusus yang ditawarkan arbitrase kepada perusahaan yang melakukan bisnis lintas negara, termasuk keahlian dan persepsi netralitas pembuat keputusan, kerahasiaan, penegakan penghargaan di seluruh dunia dan fleksibilitas prosedur, perusahaan sangat bergantung pada arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan cenderung puas dengan proses. Selain itu, terdapat juga laporan peningkatan kasus arbitrase internasional (International Centre for Dispute Resolution ("ICDR")) yang diterima oleh American Arbitration Association telah berkembang secara dramatis selama dekade terakhir, dari 646 kasus pada tahun 2003 menjadi 1.091 kasus pada tahun 2013 (Stipanowich, 2014: 300).

Saat ini, ada banyak lembaga Arbitrase Internasional yang memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun beberapa pedoman arbitrase internasional yang paling terkenal antara lain yang diterbitkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), International Centre for Dispute Resolution (ICDR), dll. Pada prinsipnya, para pihak yang bersengketa dapat secara bebas menentukan dan menyepakati salah satu lembaga Arbitrase Internasional tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

Salah satu keunggulan metode arbitrase internasional yaitu prosesnya lebih praktis dan berbiaya lebih murah jika dibandingkan dengan metode litigasi (Florescu, 2020: 255). Meskipun begitu, seringkali terdapat adanya intervensi dari pengadilan asing dalam proses arbitrase internasional sehingga menimbulkan lebih banyak waktu dan biaya yang dihabiskan (Pull, 2011: 21). Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka arbitrator bisa mengeluarkan anti-suit injunction dalam memutuskan suatu sengketa. Anti-suit injunction adalah perintah dari arbitrator ataupun pengadilan yang melarang para pihak untuk mengajukan gugatan di pengadilan asing

atau menegakkan perintah pengadilan asing jika memiliki yurisdiksi bersamaan atas sengketa tersebut (Dutton, 2013: 1184).

Geoffrey Fisher meneliti kasus *Aggeliki Charis Compania Maritima SpA v Pagnan SpA* ('The Angelic Grace') yang diselesaikan oleh The English Court of Appeal pada tahun 1995. Fisher mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu contoh pendekatan yang lebih liberal terhadap yurisdiksi terkait permohonan anti-suit injunction yang membatasi pelanggaran perjanjian arbitrase (Fisher, 2010: 2). Topik permasalahan dari kasus 'The Angelic Grace' adalah permohonan dari pihak penggugat yang merupakan pemilik kapal asal Panama untuk menahan pihak tergugat yaitu penyewa kapal yang berasal dari Italia untuk melanjutkan proses hukum di Pengadilan Italia. Permohonan tersebut disebabkan oleh peristiwa kecelakaan antara kapal milik penggugat dengan lift terapung milik tergugat pada saat operasi pembongkaran di Pelabuhan Italia, sehingga pihak penggugat mengajukan proses arbitrase di London sesuai dengan Perjanjian Arbitrase yang telah dibuat dengan pihak tergugat, meskipun pada saat yang sama pihak tergugat juga memulai proses hukum di Pengadilan Italia (Fisher, 2010: 3).

Permohonan terhadap anti-suit injunction bisa muncul, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap klausul exclusive jurisdiction dalam perjanjian arbitrase oleh salah satu pihak (Andrews, 2016: 74). Klausul exclusive jurisdiction menetapkan bahwa sengketa yang muncul dari perjanjian arbitrase, hanya dapat diajukan ke pengadilan arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan pihak (Andrews, 2016: 18). Sayangnya tidak semua pihak mematuhi klausul exclusive jurisdiction. Contohnya dalam kasus *The Angelic Grace* di mana salah satu pihak melanggar klausul exclusive jurisdiction yang seharusnya suatu sengketa hanya diproses pada pengadilan arbitrase di London, tetapi pihak tersebut memulai proses hukum sengketa di pengadilan Italia.

Meskipun demikian, mengajukan permohonan anti-suit injunction terhadap arbitrator maupun pengadilan tidaklah mudah (Contreras, 2020: 3). Setiap negara baik yang menerapkan sistem hukum common law atau civil law, mempunyai aturan berbeda dalam mengabulkan permohonan anti-suit injunction pada proses arbitrase internasional. Arbitrator maupun pengadilan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip mendasar dalam hal mengabulkan permohonan anti-suit injunction (Kenny, 2015: 340). Maka

dari itu, penulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan anti-suit injunction secara efektif oleh beberapa negara sebagai langkah pencegahan intervensi pengadilan asing dalam proses arbitrase internasional.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau Judicial Normative, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Soekanto, 1986: 14). Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan Konvensi. Sumber bahan hukum sekunder seperti, buku teks hukum, jurnal hukum, dan tulisan hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi ini yakni suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan bagi Arbitrator dalam Mengabulkan Permohonan Anti-Suit Injunction pada Penyelesaian Suatu Sengketa Arbitrase Internasional

Anti-suit injunction adalah perintah oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi pribadi atas suatu pihak untuk meminta pihak tersebut untuk tidak mengajukan klaim di yurisdiksi asing atau tidak melanjutkan klaim yang telah diajukan. Alasan untuk anti-suit injunction biasanya karena masalah yang sama antara pihak-pihak yang sama saat ini sedang diajukan ke pengadilan atau di

arbitrase dalam yurisdiksi pengadilan yang mengeluarkan perintah tersebut. Kekhawatiran yang mendasari perintah tersebut adalah bahwa tindakan asing akan menggagalkan hasil yang efisien di pengadilan forum, membahayakan yurisdiksinya, mengancam beberapa kebijakan nasional yang kuat, atau bahwa pihak yang melakukan litigasi di yurisdiksi asing melakukannya dengan itikad buruk dan untuk melecehkan pihak lain. (Moses, 2012: 95).

Ada risiko bahwa para pihak ketika menghadapi sengketa komersial internasional dapat mengabaikan perjanjian arbitrase, dan memulai proses pengadilan di negara selain seat of arbitration. Hal ini dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk pihak yang berpandangan bahwa klaimnya tidak dapat disangkal, atau lebih yakin bahwa ia akan berhasil dalam proses di luar negeri daripada di arbitrase.

Dalam keadaan seperti itu, ter-mohon mungkin tidak ingin mengeluarkan biaya dan kesulitan untuk menggugat proses tersebut di negara lain, dan sebaliknya dapat mencari anti-suit injunction di seat of arbitration. Di Inggris, pengadilan dengan jelas menegaskan kekuasaan mereka untuk membuat perintah semacam itu. (Rajoo, 2016: 192).

Pada prinsipnya, majelis arbitrase memiliki kekuatan berdasarkan Article 17 UNCITRAL Model Law untuk mengeluarkan anti-suit injunction yang merupakan perintah yang mengharuskan salah satu pihak untuk menahan diri dari melakukan tindakan di pengadilan lain yang melanggar perjanjian arbitrase.

Alasan untuk mengizinkan perintah tersebut adalah di mana kedua tindakan berusaha untuk mengadili masalah yang sama, di mana tujuan dari perintah tersebut adalah untuk menjaga yurisdiksi majelis arbitrase, dan untuk mencegah risiko keputusan yang tidak konsisten dalam proses paralel dan duplikasi.

Namun, majelis arbitrase harus menahan dan berhati-hati dalam mengeluarkan perintah tersebut. Tindakan tersebut dapat dicerminkan

oleh pengadilan dengan mengeluarkan perintah yang mencegah pihak lain untuk melanjutkan ke arbitrase atau litigasi di forum lain atau bahkan menahan salah satu pihak dengan anti-suit injunction untuk mencari anti-suit injunction lain di forum asing (Rajoo, 2016: 522).

1. **Seat of Arbitration (Lex Loci Arbitri) yang Tidak Sesuai dalam Perjanjian Arbitrase**

Merupakan hal yang lumrah dalam bidang hukum, aturan, dan komentar untuk menggunakan "place" dan "seat" arbitrase secara bergantian. Namun, "seat" lebih sering dipakai daripada "place" karena mencerminkan secara lebih akurat sifat yuridis dari konsep tersebut, hubungan antara keterikatan teritorial dan hukum yang berlaku. Seat of arbitration merupakan suatu negara di mana arbitrase internasional memiliki domisili hukum atau rumah yuridisnya (Born, 2014: 1537). Referensi ke "seat" juga membantu untuk membedakan lampiran yuridis dari tempat fisik di mana sidang dan pertemuan diadakan, sehingga menghindari ambiguitas dan potensi argumen tentang lokasi yang dimaksudkan dari seat of arbitration di mana perjanjian arbitrase tidak dirancang dengan baik dalam hal ini (seperti biasa terlihat dalam praktek). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan sebagian besar aturan arbitrase menarik perbedaan yang jelas antara kursi arbitrase dan lokasi untuk persidangan arbitrase dan pertemuan, dan menetapkan bahwa yang terakhir dapat berubah sesuai dengan kenyamanan tanpa mempengaruhi koneksi yang mendasari ke seat of arbitration (Henderson, 2014: 891-892).

Perbedaan antara seat of arbitratin dan lokasi untuk persidangan arbitrase telah dijelaskan oleh pengadilan arbitrase Singapura dalam kasus PT Garuda Indonesia v Birgen Air pada tahun 2002. Dalam persidangan kasus

tersebut, perjanjian arbitrase kedua pihak menyatakan bahwa sidang arbitrase "shall be held in Jakarta, Indonesia" dan bahwa Jakarta adalah "the seat of arbitration". Namun, pihak Pemohon berargumen bahwa seat of arbitration telah diubah ke Singapura dengan perjanjian para pihak versi terbaru dikarenakan sidang arbitrase telah diadakan di Singapura dan perwakilan Singapura dari ICC telah memberikan dukungan administratif dan hukum untuk kasus tersebut (*Garuda Indonesia v Birgen Air*, 2002: 14). Pengadilan arbitrase Singapura kemudian menolak pendapat dari pihak Pemohon tersebut dan berpendapat bahwa hukum acara yang berlaku untuk suatu kasus dengan mengacu pada pilihan seat of arbitration tidak terpengaruh oleh keputusan untuk mengadakan sidang di tempat lain, yang dijelaskan sebagai berikut:

"There is a distinction between 'seat of arbitration' and the place where the arbitral tribunal carries on hearing witnesses, experts or the parties, namely, the 'venue of hearing'. The seat of arbitration is a matter to be agreed by the parties. Where they have so agreed, the seat of arbitration does not change even though the tribunal may meet to hear witnesses or do any other things in relation to the arbitration ... It only changes where the parties so agree ... While the agreement to change the seat of arbitration may be implied, it must be clear. This is in the interest of certainty" (*Garuda Indonesia v Birgen Air*, 2002: 23-25).

Article 2 dari *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses* 1923 telah menggambarkan pandangan awal bahwa hukum yang berlaku untuk arbitrase harus sesuai dengan arbitral seat atau seat of arbitration, yang dinyatakan sebagai berikut:

"The arbitral procedure, including the constitution of the arbitral tribunal, shall be governed by the will of the parties and by the law of the country in whose territory the arbitration takes place."

Pendekatan yang sama juga terlihat dalam instrumen hukum arbitrase internasional modern. Salah satu yang paling menonjol, dapat terlihat dalam Article 1(2) dari *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari ketentuan konvensi tersebut akan berlaku jika "only if the place of arbitration is in territory of this State". Berdasarkan dari kedua aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku untuk setiap persidangan arbitrase internasional adalah hukum dimana tempat persidangan arbitrase internasional tersebut sedang berlangsung. Selain itu, pemilihan seat of arbitration tertentu oleh kedua pihak dalam perjanjian arbitrase biasanya juga menghasilkan arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum perjanjian arbitrase tersebut, dengan pengurangan atau perubahan yang dapat disepakati oleh kedua pihak.

Sebagai contoh, pada kasus *Dermajaya Properties Sdn Bhd v Premium Properties Sdn Bhd* di tahun 2002, jika dilihat dari perjanjian arbitrase yang disetujui oleh kedua pihak, mereka bersepakat untuk memilih Singapura sebagai seat of arbitration sehingga secara otomatis *Singapore Arbitration Act* (SAA) atau *International Arbitration Act* (IAA) dapat berlaku dalam persidangan arbitrase kedua pihak tersebut, sebagaimana dengan pernyataan hakim di persidangan arbitrase kasus tersebut, yaitu:

"If Singapore is the place of arbitration, the curial law of Singapore applies ... I would add that the curial law, or the *lex arbitri* as it is sometimes called,

is not necessarily restricted to a set of procedural rules governing the conduct of the arbitration. By choosing the 'seat of arbitration' the parties would have also thereby decided on the law which is to govern the arbitration proceedings" (Dermajaya v Premium, 2002: 54).

Pemilihan forum lembaga arbitrase sebagai 'place' atau 'seat' of arbitration tampak penting dalam setiap permohonan agar pengadilan forum mengeluarkan anti-suit injunction untuk menahan potensi pelanggaran di dalam perjanjian arbitrase. Diragukan bahwa pengadilan akan memberikan perintah di mana arbitrase tidak memiliki hubungan dengan forum. Tetapi di mana arbitrase akan diadakan di forum, yurisdiksi pengawasan pengadilan forum terkait dengan arbitrase itu (Fisher, 2010: 5).

2. Pelanggaran terhadap **Exclusive Jurisdiction** dalam Perjanjian Arbitrase

Pada sebagian besar negara common law, pengadilan arbitrase umumnya akan memberlakukan klausul exclusive jurisdiction yang mengakibatkan pengadilan asing harus menunda suatu proses hukum yang melanggar suatu perjanjian arbitrase, atau bahkan harus menolak untuk menindaklanjuti suatu proses hukum di luar yurisdiksi perjanjian arbitrase (Dicey, 2012: 483). Namun, pengadilan arbitrase negara common law juga dapat mengesampingkan pilihan yurisdiksi dalam klausul exclusive jurisdiction, meskipun pihak penggugat mempunyai alasan yang kuat mengapa proses hukum tersebut dianggap adil dan pantas untuk dilanjutkan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam kasus *The Eleftheria* pada tahun 1969, di mana Brandon LJ menetapkan lima pertimbangan relevan untuk menentukan alasan kuat yang memungkinkan proses hukum di-

lanjutkan di pengadilan Inggris meskipun ada klausul exclusive jurisdiction, antara lain:

- a. apakah terdapat bukti atau fakta di negara lain yang lebih mudah tersedia, sehingga berpengaruh pada kenyamanan relatif dan biaya persidangan antara pengadilan Inggris dan pengadilan asing;
- b. apakah terdapat hukum pengadilan asing yang berbeda dengan hukum Inggris dalam hal materi apa pun;
- c. apakah terdapat negara lain yang terhubung dengan salah satu pihak, dan seberapa dekat hubungan antara pihak tersebut dengan negara lain;
- d. apakah pihak tergugat pada umumnya menginginkan persidangan di luar negeri, atau hanya mencari keuntungan prosedural;
- e. apakah pihak penggugat akan dirugikan jika harus mengikuti proses hukum di pengadilan asing karena mereka akan:
 - 1) kehilangan keamanan untuk klaim mereka;
 - 2) tidak dapat menegakkan keputusan apa pun yang diperoleh;
 - 3) dihadapkan pada batasan waktu yang tidak berlaku di Inggris; atau
 - 4) karena alasan politik, ras, agama, atau alasan lain yang tidak mungkin mendapatkan putusan pengadilan yang adil (*The Eleftheria*, 1969: 94).

Sebaliknya, di sebagian besar negara civil law, pengadilan arbitrase berkewajiban untuk menegakkan klausul exclusive jurisdiction yang sah dan tidak memiliki keleluasaan untuk mengesampingkannya, yang mana sesuai dengan Article 17 dari Brussels Convention 1968 dan Lugano Convention 1988. Tentu saja, klausul exclusive jurisdiction

juga dapat dikesampingkan baik di negara-negara common law dan civil law di mana ketentuan hukum wajib mengharuskan kasus tersebut untuk didengar oleh pengadilan arbitrase, dan setidaknya di negara-negara civil law, exclusive jurisdiction juga dapat dikesampingkan oleh aturan hukum yang berlaku (Dutson, 1997: 686).

Article 17 dari Brussels Convention 1968 dan Lugano Convention 1988 berlaku di seluruh European Economic Area (EEA). Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika para pihak dalam suatu perjanjian, setidaknya salah satu dari mereka berdomisili di suatu negara dalam EEA, diharuskan untuk memilih pengadilan dari suatu negara EEA untuk menyelesaikan perselisihan mereka, kecuali jika negara EEA lainnya memiliki aturan hukum lain terkait exclusive jurisdiction berdasarkan Article 16 atau pihak tergugat telah menyerahkan terhadap yurisdiksi pengadilan negara EEA lainnya berdasarkan Article 18, maka pengadilan yang dipilih memiliki exclusive jurisdiction dan pengadilan negara EEA lainnya harus menolak yurisdiksi tersebut. Ketentuan ini berlaku wajib sehingga setiap pengadilan negara EEA termasuk pengadilan Inggris tidak akan mempertahankan kebijaksanaan apapun untuk mengesampingkan jurisdiction clause dalam menerapkan Article 17. Namun demikian, dalam hal forum alternatif yang salah satunya dari negara non-EEA, kemungkinan ada ruang untuk berargumentasi bahwa ketentuan Article 17 berlaku tidak wajib. Kondisi tersebut dapat terjadi jika para pihak, yang keduanya tidak berkedudukan di suatu negara EEA, memilih pengadilan-pengadilan di suatu negara EEA, maka pengadilan-pengadilan negara EEA lainnya tidak dapat melaksanakan yurisdiksi kecuali jika pengadilan negara EEA yang dipilih telah menolaknya (In Re

Harrods, 1992: 72). Sedangkan di Inggris, pengadilan arbitrase telah memutuskan bahwa Article 21 yang dalam hal memberikan prioritas kepada pengadilan negara EEA pertama kali dalam mengambil tindakan hukum, harus tunduk pada Article 17 (Continental Bank v Aeakos Compania Naviera, 1994: 54). Hasilnya adalah bahwa pengadilan arbitrase Inggris tidak akan dicegah dari memberikan anti-suit injunction semata-mata karena penyebab tindakan yang sama telah diajukan ke pengadilan di negara EEA lain.

Sejauh ini, Pengadilan Arbitrase Inggris menyatakan bahwa proses ganti rugi telah tersedia untuk kasus pelanggaran arbitration clause (The Jay Bola, 1997: 285). Tampaknya jelas bahwa prinsip yang sama juga berlaku untuk kasus pelanggaran exclusive jurisdiction clause (The Angelic Grace, 1995: 95-97). Pada kebanyakan kasus, hal ini tidak akan menjadi solusi yang memuaskan ketika salah satu pihak yang telah menyetujui arbitrase/litigasi dalam forum tertentu telah sering memilih mekanisme dan forum tersebut untuk alasan yang baik. Namun, akan ada kasus di mana terdapat tindakan penundaan proses hukum atau anti-suit injunction yang tidak efektif atau tidak dapat diputuskan.

Proses ganti rugi kontraktual idealnya adalah kompensasi atas kehilangan tawar-menawar, yaitu ganti rugi yang menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi yang seharusnya dia dapatkan seandainya kontrak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, penggugat berhak memperoleh ganti rugi atas biaya, kerugian dan pengeluaran yang telah dikeluarkannya sebagai akibat dari wanprestasi (Johnson v Agnew, 1980: 400). Maka dari itu, menurut Stuart Dutson, beberapa kerugian potensial yang diterima oleh penggugat atas pelanggaran

arbitration clause/exclusive jurisdiction adalah:

- a. biaya dari setiap anti-suit injunction yang melebihi dan di atas jumlah apapun yang ditujukan kepada penggugat;
- b. biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadilan asing di yurisdiksi yang dilanggar;
- c. jika penggugat membela proses pengadilan asing, setiap biaya selain yang termasuk dalam item terakhir yang tidak ditujukan kepada penggugat oleh pengadilan asing, tetapi yang akan diberikan kepadanya jika proses substantif terjadi di Inggris;
- d. setiap kenaikan biaya proses arbitrase/pengadilan yang disebabkan oleh proses pengadilan asing yang tidak ditujukan kepada penggugat oleh pengadilan/pengadilan;
- e. setiap biaya/kerugian yang dikeluarkan oleh penggugat dalam membela setiap upaya untuk melaksanakan putusan asing yang diperoleh pihak lawan;
- f. segala biaya/kerugian yang timbul jika pihak lawan berhasil melaksanakan putusan asing terhadap aset penggugat (Dutson, 2000: 97).

Jika pihak lawan telah memenuhi kewajibannya di bawah *arbitration clause/exclusive jurisdiction clause* maka proses anti-suit injunction, tantangan yurisdiksi di pengadilan asing, pembelaan atas jasa apa pun dalam proses pengadilan asing, dan klaim dalam proses arbitrase/pengadilan untuk pelanggaran *arbitration clause/exclusive jurisdiction clause*, tidak akan terjadi.

3. Pendapat para Ahli Hukum terkait Anti-Suit Injunction dalam Beberapa Kasus Terdahulu

Jika dilihat dari sisi sejarah, anti-suit injunction pertama kali diterapkan di pengadilan Inggris

khususnya dalam putusan kasus *Bushby v. Munday* (1814-23) All E.R. Rep. 304, di mana Pengadilan Inggris mencegah salah satu pihak untuk melanjutkan proses litigasi di pengadilan Skotlandia (Hirsch, 2021: 4). Putusan dari kasus tersebut membuka jalan bagi peningkatan pesat dalam penggunaan anti-suit injunction di berbagai negara. Sehingga di masa sekarang, berbagai perusahaan di seluruh dunia terutama perusahaan besar dan layak secara finansial, selalu wajib dalam memasukkan kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian hukum atau kontrak komersial yang memungkinkan untuk memilih arbitrase komersial internasional demi melindungi bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut juga memasukkan hukum apa pun yang mereka inginkan untuk mengatur perselisihan yang kemungkinan terjadi di masa depan, dan tempat untuk memulai persidangan arbitrase di perjanjian hukum mereka (Moreno, 2020: 119).

Setelah adanya kasus *Bushby v. Munday*, kemudian muncul beberapa kasus di mana para ahli hukum memberikan pendapat hukum yang penting terkait pengembangan anti-suit injunction. Berikut di bawah ini penulis menyertakan pendapat hukum para ahli hukum di beberapa putusan kasus anti-suit injunction:

- a. Pada putusan kasus *Cohen v. Rothfield* [1919] 1 K.B. 410 yang diselenggarakan di English Court of Appeals, Scrutton L.J., menganggap bahwa litigasi asing yang menindas dan menyulitkan pihak lain adalah alasan yang cocok untuk memberikan anti-suit injunction untuk menghentikan proses litigasi asing tersebut, meskipun beliau menekankan bahwa "this power should be exercised with great caution to avoid even the appearance

of undue interference with another court" (1919: 418)

- b. Pada putusan kasus *Nationale Industrielle Aerospatiale v. Lee Kui Jak*, [1987] A.C. 871 yang diselenggarakan di Judicial Committee of the Privy Council, Lord Goff menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemberlakuan anti-suit injunction, beliau mengatakan bahwa:

"The law relating to anti-suit injunctions restraining a party from commencing or pursuing legal proceedings in a foreign jurisdiction has a long history, stretching back at least as far as the early nineteenth century. From an early stage, certain basic principles emerged which are now beyond dispute: 1) the jurisdiction is to be exercised when the "ends of justice" requires it; 2) the court's order is not directed against the foreign court but it is against one of the parties; 3) an injunction may only be issued restraining a party who is amenable to the jurisdiction of the court, against whom an injunction would be an effective remedy; and 4) since such an order indirectly affects the foreign court, the jurisdiction is one which has to be exercised with caution" (1987: 893).

- c. Pada putusan kasus *Insurance Co., Inc. v. Bristol Myers Squibb Co.* 929 S.W. 2d 114 (1996), Court of Appeals of Texas menyatakan bahwa anti-suit injunction dapat diterapkan sesuai dalam empat kondisi, yaitu: 1) untuk mengatasi ancaman terhadap yurisdiksi pengadilan; 2) untuk mencegah penghindaran kebijakan publik yang penting; 3) untuk mencegah banyaknya tuntutan; dan 4) untuk melindungi suatu pihak

dari proses pengadilan yang menindas dan tidak adil.

- d. Pada putusan kasus *Evergreen International SA v Volkswagen Group Singapore Pte Ltd* [2003] SGHC 142 yang diselenggarakan di Singapore High Court, Belinda Ang Saw Ean J ("Ang J") menyatakan bahwa beliau harus mempertimbangkan beberapa elemen berikut dalam menentukan apakah anti-suit injunction harus diberikan dalam kasus tersebut, antara lain:
- 1) Apakah pihak lawan dapat menerima yurisdiksi pengadilan Singapura;
 - 2) forum pengadilan awal yang seharusnya untuk penyelesaian perselisihan antara para pihak;
 - 3) dugaan penindasan dan ketidakadilan hukum terhadap pihak pemohon jika proses pengadilan asing akan dilanjutkan;
 - 4) ketidakadilan yang diduduhkan kepada pihak lawan sebagai suatu perintah akan menghilangkan pihak lawan dari keuntungan-keuntungan yang dicari dalam proses pengadilan asing; dan
 - 5) apakah terdapat lembaga pengadilan asing yang terlibat dalam pelanggaran kesepakatan hukum antara para pihak (2003: 2-6).
- e. Kasus *Ever Judger Holding Co Ltd v Kroman Celik Sanayii Anonim Sirketi* (2015) 3 HKC 246 merupakan kasus anti-suit injunction Hongkong pertama, di mana pengadilan arbitrase Hongkong memberikan anti-suit injunction untuk mendukung perjanjian arbitrase Hongkong. Pengadilan arbitrase Hongkong juga menetapkan prinsip bahwa sebagai perselisihan hukum

dengan yurisdiksi Hongkong, pengadilan arbitrase Hongkong harus memberikan perintah untuk menahan proses litigasi asing yang melanggar perjanjian arbitrase selama tindakan itu dipenuhi segera dan proses litigasi asing tidak memberi keadilan bagi pihak lain, kecuali pihak lain tersebut memiliki alasan kuat untuk menentang permohonan anti-suit injunction.

B. Penerapan Anti-Suit Injunction sebagai Langkah Pencegahan Diajukannya Sengketa ke Pengadilan Asing dalam Melaksanakan Proses Arbitrase Internasional di Negara Common Law dan Negara Civil Law

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ronald B. Moreno, anti-suit injunction yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan arbitrase dapat memiliki dua efek yang berbeda, antara lain:

- a. Anti-suit injunction dapat melarang salah satu pihak untuk melakukan proses hukum yang dimulai dengan melanggar suatu perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelumnya dan dianggap sah oleh pengadilan arbitrase;
- b. Anti-suit injunction juga dapat melarang salah satu pihak untuk melanjutkan proses hukum di pengadilan asing yang dianggap telah dimulai tanpa adanya suatu perjanjian arbitrase yang sah (Moreno, 2020: 118).

Secara umum, penerapan anti-suit injunction dalam arbitrase internasional harus dianalisis berdasarkan praktik hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi negara. Salah satu contohnya yaitu The Federal Constitutional Court of Germany, yang memperkenalkan doktrin yurisprudensi kompetenz-kompetenz yang penting dalam pelaksanaan arbitrase komersial internasional dan digunakan secara luas oleh banyak negara. Doktrin tersebut memberikan pengadilan atau majelis arbitrase internasional suatu kompetensi yurisdiksi untuk memutuskan sejauh mana

kompetensinya pada sengketa tertentu (Barcelo, 2017: 13).

Tidak seperti Inggris yang menggunakan sistem common law, negara-negara anggota Europe Union (EU) yang menggunakan sistem civil law seperti Jerman, Perancis, Belanda, dll justru tidak mengizinkan penerapan anti-suit injunction. Hal ini dikarenakan penerapan anti-suit injunction untuk pelanggaran dengan klausul exclusive jurisdiction, justru dianggap sebagai pelanggaran terhadap principle of mutual trust dan principle of effectiveness of EU law (effet utile) (Ahmed dan Beaumont, 2017: 2). Secara khusus, Article 27 dari Brussels I Regulation mengadopsi secara formal tentang principles of comity. Berdasarkan Article 27 dari Brussels I Regulation, setelah proses pengadilan dimulai di pengadilan di negara anggota EU mana pun, semua pengadilan lain di dalam EU harus menolak yurisdiksi atas proses paralel. Sehingga, pemberian anti-suit injunction untuk mencegah suatu pihak mempertahankan gugatan yang diajukan sebelumnya di Negara Anggota EU tidak sesuai dengan Article 27 dari Brussels I Regulation. Namun, Article 27 dari Brussels I Regulation ditafsirkan tidak berlaku untuk proses arbitrase dan European Court of Justice telah menyatakan bahwa pengadilan arbitrase dapat mengeluarkan anti-suit injunction untuk mencegah proses litigasi asing di negara anggota EU (Contreras dan Eixenberger, 2017: 5). Saat ini, dengan adanya perubahan terbaru Article 27 dari Brussels I Regulation yang mulai berlaku pada tahun 2015, akan memungkinkan pengadilan negara anggota EU untuk mengeluarkan anti-suit injunction jika perselisihan melibatkan perjanjian arbitrase.

Maka dari itu, berikut penulis menyajikan contoh analisis empat kasus dari empat negara berbeda (Inggris, Amerika Serikat, Rusia, China) yang berkaitan dengan permohonan anti-suit injunction dalam pengadilan arbitrase komersial internasional, di bawah sistem hukum yang berbeda, yaitu common law dan civil law.

a. Negara dengan Sistem Common Law

1) Yurisdiksi Inggris

Penerapan anti-suit injunction dapat dilacak untuk pertama kali digunakan di Inggris sebagai larangan tertulis terhadap perluasan yurisdiksi pengadilan gereja di abad ke-15, dalam waktu seperti itu sebenarnya ditujukan ke pengadilan lain, bukan kepada pihak lawan (Bermann, 1990: 594). Kemudian, digunakan oleh Court of Chancery sebagai perintah perbaikan yang ditujukan kepada pihak lawan untuk melarang memulai atau melanjutkan pengadilan common law yang bertentangan dengan hati Nurani (Mosimann, 2010: 9). Pada abad ke-19, anti-suit injunction mulai diterapkan di luar Inggris dan bahkan lebih jauh lagi (Hartley, 1987: 490). Alasan kemampuan untuk menahan satu pihak untuk memulai proses pengadilan di wilayah lain selain Inggris terletak pada pandangan yurisdiksi in personam pengadilan tersebut atas pihak yang ingin memulai proses di negara lain (Ingraham, 2019: 299). Oleh karena itu, jika pengadilan memiliki yurisdiksi atas pihak kontrak, maka pengadilan dapat memiliki kekuatan untuk memerintahkan pihak lawan untuk tidak melakukan tindakan hukum apa pun, bahkan di wilayah kedaulatan yang berbeda.

Saat ini, meskipun anti-suit injunction common law tidak ada lagi berdasarkan section 24(5) dari Supreme Court of Judicature Act 1873, namun secara hukum telah diterapkan kembali oleh section 37 dari Senior Courts Act 1981. Berdasarkan section 37 Senior Courts Act 1981, England High

Court dapat memberikan anti-suit injunction dalam semua kasus selama England High Court menerapkan perintah tersebut secara adil. Selain itu, anti-suit injunction dapat dikeluarkan oleh England High Court dengan atau tanpa syarat dan ketentuan yang dianggap adil oleh pengadilan tersebut.

Kemudian anti-suit injunction diumumkan sebagai prinsip umum sesuai dengan Article 38(1)(c) dari Statute of the International Court of Justice dalam kasus-kasus pelanggaran kontrak yang jelas dan diterapkan sebagai upaya terakhir, yang saat ini cukup menonjol di Inggris, dengan ketentuan bahwa anti-suit injunction diberikan dalam dua situasi utama yaitu:

- a) di mana proses litigasi asing akan melanggar perpanjangan kontrak pengadilan Inggris atau arbitrase dengan kursi arbitrase di Inggris, atau
- b) di mana proses litigasi asing tumpang tindih dengan subjek yang dilitigasi di Inggris dengan alasan yang dilembagakan dalam kasus hukum (Grodl, 2021: 363).

2) Contoh Kasus Anti-Suit Injunction di Inggris (UAU v HVB)

Adapun penerapan anti-suit injunction dalam Pengadilan Arbitrase Inggris bisa dilihat dari kasus UAU v HVB pada tahun 2021. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, Pengadilan Inggris mungkin bersedia untuk memberikan anti-suit injunction yang memerintahkan pengadilan asing yang melanggar perjanjian arbitrase terlepas dari seberapa jauh proses pengadilan asing

mungkin telah berjalan dan penundaan oleh pemohon dalam membawa permohonan. Hal ini juga menggarisbawahi komitmen Pengadilan Inggris untuk melindungi perjanjian arbitrase yang sah (Onuzulike, 2021: 37).

Kasus ini berawal dari UAU dan HVB yang menandatangani perjanjian pertanian farmout Block 1 tertanggal 23 Juli 2007 sehubungan dengan partisipasi mereka di blok minyak dan gas, lepas pantai Guinea Khatulistiwa. Perjanjian farmout tersebut sempat mengalami perubahan oleh para pihak dari waktu ke waktu setelahnya. Namun yang pasti, perjanjian farmout tersebut diketahui juga berisi kesepakatan untuk melakukan arbitrase pada Article 11 dengan ketentuan sebagai berikut:

"11.2 Dispute Resolution

Any dispute arising out of or in connection with Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Article.

The number of arbitrators shall be three.

The seat, or legal place, of [sic] arbitration shall be London.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English"

Selain itu, baik UAU bersama HVB menunjuk pihak ketiga yaitu XY selaku operator Block 1 sesuai dengan perjanjian farmout tersebut. Berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalamnya, UAU memberi tahu HVB

untuk mengakhiri pengaturan pengangkutan berdasarkan perjanjian yang berlaku mulai 31 Desember 2020. HVB menanggapi pemberitahuan tersebut dengan mengusulkan perpanjangan, yang selanjutnya ditolak oleh UAU.

Perselisihan mulai muncul ketika HVB memulai proses persidangan terhadap UAU atas pelanggaran kontrak di Guinea Khatulistiwa pada November 2020, yang menurut UAU tidak sesuai dengan klausul arbitrase di perjanjian farmout. HVB melakukannya dengan mengeluarkan klaim di Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Khatulistiwa pada 18 November 2020, dan HVB mengajukan tuntutan pokok terkait pelanggaran kontrak beserta tuntutan keringanan sementara untuk berjaga-jaga atas penyitaan aset UAU di Guinea Ekuatorial.

Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial kemudian membuat perintah *ex parte* tertanggal 26 November 2020 di atas kertas saja tanpa mengacu pada UAU. Perintah tersebut sehubungan dengan tuntutan wanprestasi, mengharuskan UAU untuk terus melaksanakan kontrak dan sehubungan dengan keringanan sementara, UAU juga harus memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk melakukan audit kepada HVB. Akan tetapi, UAU hanya mengetahui persidangan ini melalui email dan diberitahu oleh pihak XY yang dikirimkan salinan perintah oleh perwakilan hukum HVB pada 30 November 2020. Bahkan UAU tidak diberitahu secara resmi tentang proses persidangan Guinea Ekuatorial hingga 18 Januari 2021.

UAU menanggapi hasil persidangan Guinea Ekuatorial

dengan mengajukan banding terhadap perintah Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial atas dasar bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh HVB, mengingat syarat-syarat klausul arbitrase dalam perjanjian farmout. Banding itu diajukan ke Pengadilan Provinsi Guinea Ekuatorial dengan dasar bahwa persidangan tersebut harus dibatalkan karena:

- a) pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dan kompetensi dalam masalah tersebut karena hubungan antara para pihak diatur oleh perjanjian arbitrase;
- b) perjanjian arbitrase berarti bahwa pengadilan sama-sama tidak dapat memerintahkan tindakan pencegahan terhadap UAU; dan,
- c) dalam hal apapun persyaratan lain untuk memerintahkan tindakan pencegahan tidak dapat dilaksanakan.

UAU juga mendatangi ke Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial sehubungan dengan tantangan yurisdiksinya. Kemudian UAU mengajukan banding seperti yang diwajibkan oleh hukum di Guinea Ekuatorial, yang mana seharusnya dokumen banding dimasukkan ke dalam berkas Pengadilan Tingkat Pertama terlebih dahulu kemudian dipindahkan ke Pengadilan Provinsi Guinea Ekuatorial.

Akan tetapi, meskipun gugatan banding UAU telah diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar, ternyata berkas permohonan kasasi tersebut tidak termasuk dalam berkas yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Guinea Ekuatorial.

Akibatnya, Pengadilan Negeri Guinea Ekuatorial menolak permohonan kasasi tersebut dengan cara yang tidak benar. Sehingga untuk melindungi posisinya, UAU disarankan oleh pengacara Guinea Ekuatorialnya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial. Hal tersebut dilakukan pada 18 Maret 2021 dan dalam bandingnya mengangkat poin-poin berikut:

- a) bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memiliki yurisdiksi karena adanya perjanjian arbitrase;
- b) Pengadilan Negeri Guinea Ekuatorial tidak mempertimbangkan pokok persoalan kasasi, yaitu lemahnya yurisdiksi Pengadilan Tingkat Pertama.
- c) putusan Pengadilan Negeri Guinea Ekuatorial didasarkan pada kesalahan faktual.

Hingga waktu persidangan arbitrase ini berlangsung, Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial masih belum memutuskan apakah banding UAU dapat diterima. Sementara itu, HVB telah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial atas dapat diterimanya kasasi tersebut. Pada tanggal 14 April 2021 Jaksa Agung Guinea Ekuatorial mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa banding UAU tidak dapat diterima dengan alasan yang sama bahwa Pengadilan Provinsi Guinea Ekuatorial menolak banding dan keberatan yurisdiksi tidak diberitahukan ke Pengadilan Tingkat Pertama. UAU kemudian menegaskan lagi bahwa pengajuan keberatan yurisdiksi yang sebagaimana disyaratkan oleh hukum Guinea Ekuatorial telah diberitahukan kepada

Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon Mahkamah Agung harus menerima banding tersebut. Sekali lagi, pengacara Guinea Ekuatorial menasihati UAU bahwa pengajuan ini diperlukan untuk mempertahankan banding dan bukan merupakan penyerahan ke yurisdiksi. Sedangkan HVB baru-baru ini mengajukan pendapat Jaksa Agung Guinea Ekuatorial dan menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait diterimanya banding UAU.

Pada 31 Maret 2021, Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial tiba-tiba menjatuhkan perintah tambahan terhadap UAU. Hal ini tidak biasa, karena pada umumnya banding yang tertunda di Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial seharusnya memiliki efek penangguhan pada proses di Pengadilan Tingkat Pertama. Selain itu juga tidak jelas kapan atau bagaimana perintah tersebut diminta oleh HVB. Persyaratan permohonan juga membingungkan karena tampaknya mengharuskan UAU untuk melakukan pembayaran sejumlah \$8.448.000 kepada XY dan menahan diri untuk tidak melakukan kontrak. UAU juga telah memprotes pembuatan perintah itu melalui surat yang diajukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial pada tanggal 7 dan 8 April 2021. Melalui surat tertanggal 8 April 2021, Ketua Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial menulis kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tingkat Pertama yang meminta mereka untuk menunda proses apapun sampai keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan. Keputusan itu tentu saja bisa dikeluarkan kapan saja.

Sejauh terkait proses arbitrase Inggris yang diajukan oleh UAU dan diselenggarakan pada 28 Mei 2021, setelah sidang *ex parte* pada 13 April 2021 Bryan J memberikan perintah anti-suit injunction sementara sampai sidang kembali. Isi dari perintah tersebut yaitu menahan HVB dari pengajuan klaim yang telah dibuat terhadap UAU di Pengadilan Tingkat Pertama di Guinea Ekuatorial dan melarang HVB untuk memulai atau mengajukan klaim lain terhadap UAU yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian farmout Block 1 tanggal 23 Juli 2007 dan amandemen selanjutnya.

Sementara itu, Calver J menanggapi sengketa antara UAU dan HVB dengan beralih ke prinsip-prinsip yang berlaku untuk pemberian anti-suit injunction. Calver J berpendapat bahwa pengadilan arbitrase Inggris tentu saja memiliki kekuatan untuk membuat anti-suit injunction berdasarkan s.37(1) Senior Courts Act yang diatur secara adil dan nyaman. Aturan tersebut juga mengatur anti-suit injunction dalam kasus arbitrase. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan perjanjian eksklusif arbitrase London, termasuk prinsip-prinsip Angelic Grace yang terkenal akan berlaku dan pengadilan biasanya akan menggunakan kebijaksanaannya untuk memberikan anti-suit injunction untuk menahan pihak lawan dari memulai atau melanjutkan proses pengadilan luar negeri yang melanggar perjanjian arbitrase. Namun aturan itu dikecualikan jika pihak lawan dapat menunjukkan alasan yang kuat atau mengapa anti-suit injunction tidak dapat diberikan. Selain itu, Calver

J mengutip pernyataan Cockerill J bahwa hal-hal yang dianggap sebagai alasan kuat dari pelaksanaan anti-suit injunction yang bertentangan dengan keputusan umumnya, pada prinsipnya berkaitan dengan pemberlakuan gugatan di pengadilan asing sebagai lawan dari pertimbangan keputusan umum yang menimbulkan efek negatif untuk bantuan hukum yang adil (Cockerill J, *Times Trading Corporation v National Bank of Fujairah* [2020] EWHC 1078).

Calver J juga mengutip pernyataan Males J terkait penetapan alasan kuat untuk tidak memberikan keringanan ganti rugi anti-suit injunction yang semakin menantang. Males J mengatakan bahwa sementara pengadilan arbitrase seharusnya tidak ragu-ragu dalam memberikan anti-suit injunction untuk menahan pelanggaran klausul arbitrase London, tetap ditekankan asalkan pelanggaran tersebut dicari segera dan sebelum proses pengadilan asing maju terlalu jauh (Males J, *Nori Holdings Ltd* [2018] EWHC 1343 : para.105 - 106).

Brian J juga menambahkan pernyataannya dalam kasus *Qingdao v Shanghai Dong* [2018] yang mengidentifikasi tiga prinsip relevan dengan pertanyaan penundaan dalam konteks anti-suit injunction:

- a) Tiada aturan yang terkait penundaan yang berlebihan secara absolut. Pengadilan perlu menilai semua fakta dari kasus tertentu;
- b) Pertanyaan tentang penundaan dan pertanyaan tentang kesopanan saling terkait. Batu ujian kemungkinan besar adalah sejauh mana penundaan dalam mengajukan

permohonan keringanan tuntutan telah meningkatkan gangguan yang dirasakan terhadap proses pengadilan asing atau menyebabkan pemborosan waktu atau sumber dayanya;

- c) Ketika mempertimbangkan apakah ada penundaan yang tidak dapat diterima, pertimbangan yang relevan adalah waktu di mana hak-hak hukum pemohon telah menjadi cukup jelas untuk membenarkan permohonan keringanan gugatan" (*Qingdao v Shanghai Dong* [2018] EWHC 3009).

Terakhir, Calver J mengutip pernyataan Christopher Clarke LJ dalam kasus *Ecobank Transnational v Tanoh* [2015] yang merupakan klaim atas anti-enforcement injunction dan membahas isu-isu kesopanan. Christopher Clarke LJ berkata:

"Injunctive relief may be sought (a) before any foreign proceedings have begun; (b) once they have begun; (c) within a relatively short time afterwards; (d) when the pleadings are complete; (e) thereafter but before the trial starts; (f) in the course of the trial; (g) after judgment. The fact that at some stage the foreign court has ruled in favour of its own jurisdiction is not per se a bar to an anti-suit injunction ... But, as each stage is reached more will have been wasted by the abandonment of proceedings which compliance with an anti-suit injunction would bring about. That being so, the longer an action continues without any attempt to restrain it the less likely a court is to grant an injunction and considerations of comity

have greater force" (*Ecobank Transnational v Tanoh* [2015] EWCA 1309 : para 130).

Setelah memberikan berbagai pandangan dari beberapa Judge pengadilan arbitrase London di kasus-kasus masa lampau, Calver J tidak dapat menyangkal bahwa pengajuan di pengadilan Guinea Ekuatorial oleh HVB merupakan pelanggaran terhadap perjanjian arbitrase. Menurut Calver J, perjanjian arbitrase secara luas memiliki kata-kata dan klausul mengatur setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian. Terkait kasus ini, sangat jelas baik dari gugatan yang dikeluarkan oleh HVB di pengadilan Guinea Ekuatorial maupun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Guinea Ekuatorial terlihat bahwa tuntutan tersebut secara tegas didasarkan pada dugaan pelanggaran, bukan pelanggaran kontrak oleh UAU yang secara langsung melibatkan klausul arbitrase. Tidak hanya itu, interim relief yang diminta oleh HVB ternyata tidak melibatkan klausul arbitrase, sehingga menimbulkan argumen hukum yang sia-sia, mengingat hal tersebut benar-benar didasarkan pada dugaan hak substantif di bawah perjanjian para pihak.

Selanjutnya, Claver J membahas isu tiada alasan kuat terhadap ganti rugi akhir anti-suit injunction yang diberikan kepada HVB dalam kasus ini. Hal tersebut dikarenakan UAU belum tunduk pada yurisdiksi Guinea Ekuatorial. Meskipun, HVB telah menyatakan dalam korespondensi bahwa UAU telah berpartisipasi dalam proses Guinea Ekuatorial dan melepaskan haknya untuk menolak yurisdiksi pengadilan

Guinea Ekuatorial. Namun, alasan yang diberikan untuk pernyataan tersebut beserta bukti-bukti yang dikumpulkan di hadapan pengadilan arbitrase tetap salah. Sebaliknya, pengacara UAU dalam keterangannya hanya memberikan saran terhadap UAU untuk cukup mempertanyakan yurisdiksi dan ketidakteraturan prosedural pengadilan Guinea Ekuatorial saja. Selain itu, ada beberapa pertimbangan pengadilan arbitrase Inggris dalam menolak permohonan ganti rugi anti-suit injunction terhadap HVB. Pertama, tidak ada pengajuan yang dibuat oleh UAU atas dasar kasus substantif. Bahkan dalam keadaan di mana Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial membuat temuan tentang hak-hak substantif para pihak secara *ex parte* di atas kertas, UAU segera mengajukan banding atas perintah tersebut dengan alasan kurangnya yurisdiksi. Kedua, HVB sekurang telah menyarankan dalam korespondensi bahwa perselisihan antara para pihak melibatkan pihak ketiga (XY) dan ini adalah dasar di mana pemulihan anti-suit injunction harus ditolak. Menurut Claver J, XY bukan merupakan pihak dalam proses pengadilan Guinea Ekuatorial, seperti yang terlihat dari formulir klaim dan perintah Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial. Pihak XY memang benar diberi pesan, sebagai operator untuk menjamin kepatuhan oleh UAU dengan catatan sebagai persyaratan untuk membantu dalam audit, tetapi ternyata XY tidak terlibat dalam proses pengadilan Guinea Ekuatorial. Faktanya, perjanjian terkait di mana XY menjadi salah satu pihak juga diatur oleh hukum Inggris dan mengatur agar perselisihan

diselesaikan melalui arbitrase di London. Ketiga, HVB tidak pernah memberikan alasan yang sah mengapa pihaknya tidak melakukan arbitrase terhadap sengketa ini sesuai dengan kesepakatannya dengan UAU. Dengan demikian, tiada alasan kuat mengapa pengadilan arbitrase Inggris tidak boleh memberikan anti-suit injunction.

Terkait permasalahan penolakan permohonan anti-suit injunction oleh HVB, Claver J memberikan kronologi singkat tentang kasus ini sebelum memberikan pandangannya. Pada 14 Oktober 2020, UAU memberi tahu HVB tentang niatnya untuk menghentikan perjanjian pengangkutan. HVB kemudian memulai persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial pada 18 November 2020. Pada 26 November 2020, HVB memberi tahu UAU melalui email bahwa pihaknya telah mengajukan mosi darurat ke pengadilan di Malabo pada Selasa sebelumnya, tetapi tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Pada hari yang sama, Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial mengeluarkan putusannya. Pada 7 Desember 2020, XY menginformasikan kepada UAU tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial. Pada 18 Januari 2021, UAU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Guinea Ekuatorial dan melalui e-mail Mr. Ayuk dari Centurion Law Group tertanggal 29 Januari 2021 atas nama HVB menulis surat kepada UAU yang menyatakan sebagai berikut:

"Pursuant to Prince Eze's [Chairman of The defendant]

instructions, I have been advised to put an immediate cessation to all legal actions and claims by The defendant".

Namun, tidak ada langkah lebih lanjut yang diambil oleh Centurion Law Group atau HVB sendiri. Pengadilan Provinsi Guinea Ekuatorial kemudian menjatuhkan putusannya pada 23 Februari 2021. UAU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Guinea Ekuatorial pada 18 Maret 2021 dan kemudian pada 31 Maret 2021 Pengadilan Tingkat Pertama Guinea Ekuatorial menjatuhkan putusan tambahannya. Pada tahap ini UAU menyadari bahwa perlu mengambil tindakan hukum di Inggris untuk melindungi kepentingannya, sehingga pihaknya menyiapkan interim anti-suit injunction yang kemudian didengar oleh Bryan J pada 13 April 2021. Seperti yang telah Claver J jelaskan, setiap saat UAU disarankan oleh pengacara Guinea Ekuatorial bahwa pengadilan Guinea Ekuatorial tidak memiliki yurisdiksi dan bahwa UAU kemungkinan besar akan berhasil membujuk pengadilan Guinea Ekuatorial untuk menolak yurisdiksi. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum terbukti. Oleh karena itu, jelas bahwa UAU telah terlibat sebanyak yang diperlukan untuk mempertahankan posisinya dan menantang yurisdiksinya. Mengingat nasihat dari pengacaranya di Guinea Ekuatorial, UAU cukup percaya bahwa masalah yurisdiksi dapat ditangani secara efektif di Guinea Ekuatorial dan bahwa bandingnya ke Pengadilan Provinsi Guinea Ekuatorial memiliki prospek keberhasilan yang baik. Selain itu, UAU melakukan upaya korespondensi dengan

HVB pada bulan Maret 2022 untuk membujuknya agar menarik prosesnya di Guinea Ekuatorial, tetapi upaya tersebut gagal.

Ringkasnya pertama, tidak ada titik dalam proses pengadilan Guinea Ekuatorial dan banding berikutnya yang membuat UAU terlibat dengan manfaat sengketa, sehingga tidak diserahkan ke yurisdiksi Guinea Ekuatorial. Kedua, pengadilan Guinea Ekuatorial belum memberikan penilaian atau menyatakan pandangan apa pun terkait dengan status perjanjian arbitrase. Ketiga, menurut penilaian Claver J, ada alasan yang baik untuk waktu yang diambil oleh UAU dan tidak ada prasangka yang diderita oleh HVB. HVB mengatakan bahwa telah mengeluarkan biaya yang tidak perlu di Guinea Ekuatorial karena UAU telah terlibat dalam proses di sana. Namun, tampaknya bagi Claver J bahwa setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh HVB di Guinea Ekuatorial mempunyai alasan karena memilih untuk mengabaikan persyaratan yang jelas dari perjanjiannya dengan UAU untuk menengahi perselisihan apa pun di antara mereka. Selain itu juga tidak ada saran bahwa proses pengadilan di Guinea Khatulistiwa telah mencapai tahap lanjut dan bahwa HVB dirugikan sebagai akibat dari pemberian perintah pengadilan arbitrase Inggris. Dalam semua keadaan, Claver J menerima pengajuan UAU bahwa hal tersebut tidak boleh dikritik karena berusaha untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Pertama di Guinea Ekuatorial dengan cara yang dilakukannya sebagai lawan untuk segera mencari ganti rugi di pengadilan arbitrase Inggris. Masuk

dekatan bahwa tidak perlu dan berpotensi membuang waktu dan uang untuk memulai proses pengadilan arbitrase Inggris, ketika proses pengadilan Guinea Ekuatorial tidak dilanjutkan sehubungan dengan klaim substantif yang menunggu hasil dari tantangan yurisdiksi. Hal itu terutama mengingat sifat positif dari nasihat dari pengacara Guinea Ekuatorial UAU sehubungan dengan manfaat banding UAU di Guinea Ekuatorial. Ketika menjadi jelas bahwa proses Guinea Ekuatorial dan banding berikutnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka UAU dimintakan bantuan hukum secepatnya.

Dikarenakan hingga saat sidang arbitrase berlangsung proses pengadilan Guinea Ekuatorial belum berkembang sehubungan dengan klaim substantif yang menunggu hasil dari tantangan yurisdiksi, menurut penilaian Claver J, keterlambatan seperti dalam mengajukan pembebasan anti-suit injunction, tidak meningkatkan secara gangguan material yang dirasakan dalam proses pengadilan asing. UAU telah berhati-hati untuk terlibat dalam proses pengadilan Guinea Ekuatorial hanya pada masalah yurisdiksi, sehingga pemborosan waktu atau sumber daya proses pengadilan Guinea Ekuatorial telah disebabkan oleh tindakan tidak sah HVB sendiri, dikombinasikan dengan anomali prosedural yang jelas dari pengadilan Guinea Ekuatorial yang lebih rendah.

Sejauh menyangkut pelaksanaan putusan, dapat di-

atakan bahwa dalam sangat mungkin bahwa perintah tersebut tidak akan dipatuhi dan bahwa pengadilan tidak boleh

bertindak sia-sia mengingat terdakwa telah menolak untuk terlibat dengan proses sidang arbitrase ini. Namun, seperti yang dicatat Blair J dalam *Impala v Wanxiang*[2015], jarang terjadi kesulitan dalam menegakkan perintah putusan pengadilan arbitrase Inggris di negara yang mana proses hukumnya telah dilaksanakan sehingga tiada alasan kuat untuk menolak dalam memberikan anti-suit injunction (Blair J, *Impala v Wanxiang*[2015] 2 ER 234 : para.137). Selanjutnya, jika ada keputusan terhadap UAU dalam proses Guinea Ekuatorial yang diperoleh dengan melanggar perintah pengadilan arbitrase Inggris, kemungkinan memiliki implikasi sejauh upaya untuk melaksanakan putusan tersebut atau menahan UAU dalam temuan hukumnya yang bersangkutan (*The Wadi Sudr* [2010] 1 Lloyd's Rep 193 : para.125).

Terakhir, dalam hal keringanan hukum yang diajukan oleh UAU, Claver J yakin bahwa adalah hal yang tepat untuk memberikan keringanan hukum wajib. Jika perintah larangan mungkin tidak cukup untuk memastikan bahwa perintah tersebut secara praktis efektif, sedangkan di pengadilan arbitrase Inggris tindakan putusan pengadilan asing mungkin memiliki aturan berbeda, sehingga perintah wajib yang mengharuskan HVB untuk menghentikan proses pengadilan asing dapat diberikan dalam kasus yang sesuai. (*Ecom v Mosharaf* [2013] EWHC 1276: para. 37-38). Sidang arbitrase ini adalah sidang terakhir dan keringanan hukum wajib dari yang diajukan oleh UAU biasanya diberikan hanya setelah sidang terakhir,

dan perintah hukum wajib yang memerlukan penghentian proses pengadilan asing mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat dicegah dari anti-suit injunction, seperti yang terjadi di pengadilan arbitrase Inggris (*Mobile Telecommunication v Abdulaziz* [2018] EWHC 1469 : para.19). Selain itu, seperti kasus di *RiverRock* [2020], adalah hal yang tepat bahwa putusan akhir anti-suit injunction harus menahan penegakan keputusan atau perintah bersifat merugikan yang dibuat oleh pengadilan Guinea Ekuatorial atas klaim substantif. Khususnya dalam kasus ini karena perilaku HVB hingga saat ini di pengadilan Guinea Ekuatorial menunjukkan perlunya pembebasan putusan wajib terhadap UAU. Anti-suit injunction adalah langkah tepat untuk memberlakukan posisi kontrak dan untuk melindungi UAU dari risiko penilaian merugikan yang diajukan terhadapnya pada sidang berikutnya di Guinea Ekuatorial (*RiverRock* [2020] EWHC 3324 : para. 6-8).

Akhirnya, UAU yang menuntut biaya dari proses pengadilan anti-suit injunction atas dasar ganti rugi, telah diputuskan oleh Claver J bahwa HVB yang berkewajiban untuk membayar biaya proses pengadilan tersebut, karena mencerminkan praktik biasa di mana ganti rugi kontraktual anti-suit injunction diputuskan oleh pengadilan arbitrase Inggris (*RiverRock* [2020] EWHC 3324 : para. 11).

3) Yurisdiksi Amerika Serikat

U.S. Supreme Court telah menyatakan bahwa "yurisdiksi keadilan pengadilan federal

adalah yurisdiksi dalam kesetaraan yang dilaksanakan oleh High Court of Chancery in England pada saat adopsi Constitution and the enactment of the original Judiciary Act, tahun 1789," dan "prasyarat substantif untuk memperoleh pemulihan yang adil serta ketersediaan umum dari ganti rugi, bergantung pada prinsip-prinsip tradisional yurisdiksi keadilan." Namun, pengadilan federal yang lebih rendah telah mengakui bahwa "kesesuaian anti-suit injunction melibatkan pertimbangan yang berbeda dari kecocokan perintah pendahuluan lainnya" karena "anti-suit injunction menurut sifatnya, melibatkan analisis rinci tentang international comity" (Strong, 2018: 155).

Profesor Walter Heiser telah mengklaim bahwa "terlepas dari pendekatan mana yang telah diadopsi oleh yurisdiksi, pengadilan Amerika Serikat sangat mungkin untuk memberikan anti-suit injunction internasional dalam dua kategori kasus: (1) di mana proses litigasi asing bersifat interdictory (bukan parallel), dan (2) di mana proses litigasi asing tersebut bertentangan dengan perjanjian pilihan exclusive jurisdiction." (Strong, 2018: 164).

Anti-suit injunction dapat berinteraksi dengan arbitrase dalam empat cara berbeda. Pertama, salah satu pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan anti-suit injunction untuk mencegah litigasi yang berusaha untuk maju bertentangan dengan perjanjian arbitrase yang sah. Kedua, salah satu pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah anti-suit injunction untuk mencegah arbitrase berjalan. Ketiga, salah satu pihak dapat

meminta majelis arbitrase untuk mengeluarkan anti-suit injunction. Keempat, salah satu pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan anti-suit injunction untuk melarang proses paralel mengenai penegakan putusan arbitrase asing. Masing-masing skenario ini dipertimbangkan secara bergantian (Strong, 2018: 172-173).

4) Contoh Kasus Anti-Suit Injunction di Amerika Serikat (CitiBank, N.A. v Mazza)

Adapun penerapan anti-suit injunction dalam Pengadilan Arbitrase Amerika Serikat bisa dilihat dari kasus CitiBank, N.A. v Mazza pada tahun 2020. Kasus ini merupakan permohonan anti-suit injunction yang diajukan oleh CitiBank terhadap Oscar Angel Mazza ("Mazza") agar segera menghentikan proses pengadilan di Argentina sambil menunggu proses arbitrase antara para pihak.

Kasus tersebut berawal dari Mazza yang dipekerjakan oleh Citi Argentina dari Februari 1993 sampai Agustus 2005. Pada tahun 2005, Mazza ditawarkan dan diterima di CBNA yang berlokasi di Miami ("Citi Miami"), dan secara sukarela mengundurkan diri dari Citi Argentina. Setelah mengambil posisi baru tersebut, Mazza kemudian menandatangani perjanjian arbitrase dengan CBNA bersama dengan dokumen lain yang ditandatangani pada saat pekerjaannya di Citi Miami dimulai. Baru-baru ini, Mazza menandatangani CBNA's 2017 U.S. Employee Handbook Acknowledgement, yang menyatakan, pada bagian terkait:

This Policy applies to both you and to Citi, and makes arbitration the required

and exclusive forum for the resolution of all employment-related disputes (other than disputes which by federal law are precluded from arbitration) between you and Citi (including Citi's predecessors, successors and assigns, its current and former parents, subsidiaries and affiliates . . .) . . . Therefore, you are waiving your right to bring your disputes in court or to have your disputes heard by a jury. This Policy applies to both existing and future disputes, including any disputes based on conduct that occurred before this Policy [(the "Arbitration Policy")].

Kebijakan Arbitrase juga menetapkan bahwa arbitrase harus dilakukan sesuai dengan Aturan Arbitrase Ketenagakerjaan dan Prosedur Mediasi dari American Arbitration Association ("AAA").

Pada tanggal 1 Desember 2018, Mazza diberhentikan dari pekerjaannya setelah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan rekening pengeluaran. Alih-alih menempuh arbitrase melalui AAA yang menantang penghentiannya, Mazza justru menempuh proses pengadilan di Argentina karena berdasarkan hak kerja yang timbul dari pekerjaannya di Citi Argentina. Penasehat hukum Argentina untuk Mazza menyampaikan surat tuntutan kepada CBNA dan Citi Argentina yang menuntut hak pesangon berdasarkan hukum Argentina pada tanggal 30 Januari 2019. Baik CBNA dan Citi Argentina menanggapi surat tuntutan tersebut, dengan menginformasikan bahwa Mazza tidak ber-hak atas pesangon dari pekerjaannya sesuai dengan Hukum Argentina dan mengingatkan akan klausul

arbitrase yang mengikat. Pada 12 Februari 2019, penasihat hukum Mazza di Argentina mengirim surat lain yang menunjukkan bahwa Mazza akan melanjutkan untuk memulai proses pengadilan di Argentina.

CitiBank telah mengajukan petisi untuk menegakkan haknya untuk menengahi perselisihan yang timbul dari pekerjaan Mazza dan mencegah Mazza menempuh proses pengadilan melalui sistem hukum Argentina. Pada 26 Maret 2019, CitiBank mengajukan Arbitration Notice dan Point of Claim kepada AAA. Proses pengadilan Argentina telah ditunda sambil menunggu keputusan pengadilan arbitrase Amerika Serikat atas permintaan CitiBank untuk anti-suit injunction. Selain itu, Mazza setuju untuk tidak menuntut dugaan klaimnya terhadap CitiBank di Argentina atau di mana pun selama masa penangguhan tuntutan.

Pada 7 Mei 2019, Mazza mengajukan mosi untuk menolak aduan CitiBank karena tidak adanya yurisdiksi subjek sesuai dengan Art.12(b)(1) Federal Rule of Civil Procedure dan sebagai alternatif, menolak gugatan CitiBank untuk anti-suit injunction atas kegagalan untuk menyatakan klaim sesuai dengan Art.12(b)(6) Federal Rule of Civil Procedure. Namun, pengadilan Argentina menerima laporan dan rekomendasi pengadilan arbitrase Amerika Serikat yang menolak permohonan Mazza untuk memberhentikan ("MTD R&R") pada 7 Oktober 2019.

Tanggapan Mazza terhadap mosi secara eksplisit bergantung pada dan secara substansial mengulangi semua argumen yang sama di-

kemukakan dalam mosinya untuk menolak, yang akhirnya ditolak oleh Pengadilan. Untuk alasan yang ditetapkan dalam *MTD R&R*, pengadilan arbitrase Amerika Serikat tidak setuju dengan argumen yang sama ini, dan menemukan bahwa petisi CitiBank memiliki yurisdiksi subyek berdasarkan *Federal Arbitration Act*, 9 U.S.C. 203 dan cukup menyatakan klaim untuk anti-suit injunction. Oleh karena itu, pengadilan arbitrase Amerika Serikat hanya akan membahas manfaat mosi yang belum dianalisis dalam *MTD R&R*.

Menurut Edwin G. Torres, kebijakan hukum Amerika Serikat sangat mendukung dalam penegakan perjanjian arbitrase. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*, (1985) dan kasus *Moses H. Cone Mem'l Hosp. v. Mercury Constr. Corp.*, (1983) yang menjelaskan bahwa *Federal Arbitration Act* ("FAA") sangat jelas menyatakan "kebijakan federal liberal yang mendukung perjanjian arbitrase" (*Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*, 473 U.S. 614, 638-40, 105 S. Ct. 3346, 87 L. Ed. 2d 444 (1985); *Moses H. Cone Mem'l Hosp. v. Mercury Constr. Corp.*, 460 U.S. 1, 24, 103 S. Ct. 927, 74 L. Ed. 2d 765 (1983)). Sehingga dari pernyataan tersebut, keraguan apapun mengenai ruang lingkup masalah arbitrase tetap harus diselesaikan secara arbitrase. Selain itu, *Federal Arbitration Act* juga menyatakan bahwa perjanjian arbitrase "harus sah, tidak dapat dibatalkan dan dapat dilaksanakan, kecuali berdasarkan alasan yang ada dalam hukum atau ekuitas untuk pencabutan kontrak apa pun." di Art.9 U.S.C. 2.

Namun, tanggapan kuat yang mendukung arbitrase, hanya berlaku untuk perselisihan yang telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan secara arbitrase dan para pihak tidak dapat dipaksa untuk mengajukan arbitrase jika mereka tidak setuju untuk melakukannya (*Becker v. Davis*, 491 F.3d 1292, 1298 (11th Cir. 2007); *Magnolia Capital Advisors, Inc. v. Bear Stearns & Co.*, 272 F. App'x 782, 785 (11th Cir. 2008)).

Section 4 *Federal Arbitration Act* juga mengizinkan pengadilan arbitrase Amerika Serikat untuk memaksa arbitrase ketika salah satu pihak telah gagal, mengabaikan, atau menolak untuk mematuhi ketentuan arbitrase. Lebih lanjut, Art.9 U.S.C. 4 *Federal Arbitration Act* menyatakan jika pengadilan arbitrase Amerika Serikat menemukan bahwa ada perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak, maka pengadilan arbitrase Amerika Serikat akan membuat perintah yang mengarahkan para pihak untuk melanjutkan ke arbitrase sesuai dengan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, *Federal Arbitration Act* tidak meninggalkan ruang untuk pelaksanaan keputusan oleh pengadilan distrik, tetapi sebaliknya mengharuskan para pihak untuk diarahkan dalam melanjutkan ke arbitrase tentang masalah-masalah yang telah disepakati oleh perjanjian arbitrase (*Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd*, 470 U.S. 213, 218, 105 S. Ct. 1238, 84 L. Ed. 2d 158 (1985)).

Edwin G. Torres juga menyatakan bahwa pengadilan arbitrase Amerika Serikat menggunakan penyelidikan dua langkah untuk menentukan apakah perjanjian para pihak tersebut harus mewajibkan

arbitrase. Pengadilan arbitrase Amerika Serikat pertama-tama akan menentukan apakah para pihak setuju untuk melakukan arbitrase terhadap perselisihan tersebut, dan kemudian apakah kendala hukum di luar kesepakatan para pihak menutup arbitrase. (*Klay v. All Respondent*, 389 F.3d 1191, 1200 (11th Cir. 2004)). Langkah kedua, pengadilan arbitrase Amerika Serikat memerlukan penyelidikan untuk menentukan apakah kongres telah dengan jelas menyatakan niat untuk menghalangi arbitrase dari klaim hukum (*Augustin v. Cubesmart, L.P.*, 2018 US Dist. LEXIS 195925, 2018 WL 6198369, at *2 (SD Fla. 15 November 2018)).

Pada sidang pengadilan arbitrase Amerika Serikat ini, kedua langkah penyelidikan telah ditetapkan. Untuk langkah pertama, Mazza tidak membantah terkait persetujuan dengan perjanjian arbitrase, dan tidak membantah bahwa Mazza tidak melaksanakannya atau mengetahui ketentuan-ketentuannya. Perjanjian arbitrase mensyaratkan bahwa semua sengketa terkait pekerjaan di masa mendatang antara Mazza dan CitiBank tunduk pada arbitrase sesuai dengan aturan AAA. Perselisihan yang dipermasalahkan didasarkan pada kegagalan CitiBank untuk membayar pesangon kepada Mazza atas pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat dibenarkan oleh CitiBank. Maka dari itu, para pihak telah sepakat untuk menengahi perselisihan terkait pekerjaan Mazza sesuai dengan aturan AAA.

Namun, Mazza berpendapat bahwa perjanjian arbitrase hanya mencakup sengketa yang tunduk pada hukum federal Amerika Serikat

dan bahwa sengketa terkait pekerjaannya didasarkan pada hukum Argentina. Mazza juga menambahkan bahwa setiap perselisihan yang terkait dengan pekerjaan dilarang dari arbitrase oleh undang-undang federal Argentina. Mazza secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum Argentina berlaku karena selama ini Mazza terus mempertahankan domisilinya di Argentina dan sering bepergian ke sana selama bekerja di Citi Miami. Pernyataan ini adalah argumen yang sama yang dibuat Mazza dalam mosinya untuk menolak, yang menurut pengadilan arbitrase Amerika Serikat tidak berlaku karena alasan yang tercantum dalam MTD R&R. Hal tersebut dikarenakan Mazza hanya mengulangi dalil-dalil tersebut dalam tanggapannya terhadap mosi, maka tidak ada alasan bagi pengadilan arbitrase Amerika Serikat untuk mengulangi mengapa tidak sependapat dengan Mazza di sini.

Sekalipun meninjau catatan secara keseluruhan untuk keperluan permohonan tersebut, namun dalil Mazza dinilai tidak berbobot berdasarkan catatan yang dihadirkan. Edwin G. Torres berpendapat bahwa mustahil untuk menemukan dalam catatan ini bahwa hukum Argentina memiliki pengaruh pada hasil perselisihan yang tertunda. Mazza tidak pernah memberikan dasar yang nyata atau persuasif untuk menemukan bahwa hukum Argentina akan mengatur perselisihan ini. Mazza juga tidak membantah bahwa tempat hubungan kerja berbasis di Amerika Serikat, dan mengakui bahwa telah bekerja untuk Citi Miami selama tiga belas tahun hingga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, juga tidak ada

perselisihan bahwa Mazza tidak bekerja atau menerima kompensasi dari entitas CitiBank di Argentina sejak tahun 2005. Tidak terpengaruh, untuk mendukung teori pilihan hukumnya, Mazza menekankan hubungan kerja sebelumnya dengan Argentina dan niatnya untuk tetap berdomisili di sana. Tapi Mazza masih gagal untuk mengajukan dasar hukum untuk mempertahankan teorinya atau mengapa hukum Argentina akan mengatur keputusan Mazza dari bank domestik, di mana Mazza tinggal di Miami dan bekerja untuk bank domestik di sana selama lebih dari satu dekade, di mana bank tersebut tempat melamarkannya dan memperoleh persetujuan yang didasarkan pada Mazza yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, dan di mana tidak ada klausul pilihan hukum dalam perjanjian kerja yang dipermasalahkan yang menunjuk ke Argentina dengan cara apa pun.

Hal terbaik yang bisa dikatakan untuk posisi Mazza adalah bahwa pihaknya masih ingin mengambil keuntungan dari hukum Argentina meskipun ada hambatan. Tetapi seperti yang telah lama dipegang oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, keyakinan atau niat subjektifnya bukanlah inti dari analisis, karena arbitrase adalah masalah kontrak (*AT&T Mobility LLC v. Concepcion*, 563 U.S. 333, 339, 131 S. Ct. 1740, 179 L. Ed. 2d 742 (2011)). Jadi pengadilan arbitrase Amerika Serikat harus menempatkan perjanjian arbitrase pada pijakan yang sama dengan kontrak lain dan menegakkannya sesuai dengan persyaratan mereka. Jika syarat-syarat tersebut secara jelas mengatur arbitrase dari suatu sengketa tertentu,

dan tidak mengandung batasan atau ketentuan apa pun pada perjanjian tersebut, maka syarat-syarat kontraktual tersebut harus ditegakkan. Ketentuan tersebut dapat terlihat jelas dalam kasus *Parks IP Law, LLC v. Wood* (2018), yang mana membalikkan penolakan mosi untuk memaksa arbitrase dalam menghadapi perjanjian kontrak yang tidak ambigu yang membutuhkan arbitrase perselisihan ketenagakerjaan (*Parks IP Law, LLC v. Wood*, 755 F. App'x 884, 888 (11th Cir. 2018)). Tidak hanya itu, Edwin G. Torres juga mengutip pendapat para hakim di kasus *First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan* (1995) yang menyatakan bahwa pengadilan arbitrase Amerika Serikat umumnya harus menerapkan prinsip-prinsip hukum negara bagian biasa yang mengatur pembentukan kontrak, dalam menentukan apakah para pihak telah setuju untuk melakukan arbitrase (*First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan*, 514 U.S. 938, 944, 115 S. Ct. 1920, 131 L. Ed. 2d 985 (1995)).

Ketika menafsirkan kontrak kerja seperti ini, termasuk kontrak yang mencakup ketentuan arbitrase, undang-undang kontrak negara forum ini menetapkan bahwa ketergantungan setelah fakta pada niat subjektifnya dalam menandatangani perjanjian, maka tetap tidak akan mengubah maknanya (*Wallshein v. Shugarman*, 50 So. 3d 89, 90 (Fla. 4th DCA 2010)). Maksud para pihak untuk meminta arbitrase adalah yang terpenting, tetapi niat itu tercermin paling baik dengan bahasa sederhana dari perjanjian (*BallenIsles Country Club, Inc. v. Dexter Realty*, 24 So. 3d 649, 652 (Fla. 4th

DCA 2009)). Jika bahasa dari klausul arbitrase dalam perjanjian kerja jelas dan tidak salah lagi, maka maksud subyektif tidak material dalam menentukan arti dari perjanjian kerja.

Pada sidang pengadilan arbitrase Amerika Serikat, dokumen pekerjaan yang ditandatangani oleh Mazza tidak mengandung ketentuan yang menjamin haknya untuk menegaskan yurisdiksi Argentina atau hukum Argentina. Tidak ada ketentuan yang menjamin hak Mazza untuk menegaskan hukum tempat kedudukannya. Dokumen tersebut hanya memasukkan perjanjiannya yang jelas dan tidak salah untuk memasukkan arbitrase AAA jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan, yang tunduk pada penegakan di bawah Federal Arbitration Act. Jadi secara hukum, niat apapun yang mungkin Mazza pertahankan secara diam-diam tidak dapat menjadi alasan setelah suatu fakta hukum ditemukan untuk merusak bahasa sederhana dari perjanjian yang Mazza tandatangani.

Beralih kemudian ke langkah kedua dari analisis yang relevan, Kongres tidak menghalangi perselisihan terkait dengan pembayaran pesangon setelah seorang karyawan diberhentikan dari arbitrase. Mazza berpendapat bahwa hukum Argentina adalah pengekan hukum yang melarang arbitrase. Penyelidikannya adalah apakah Kongres AS bermaksud untuk melarang perselisihan Mazza. Selain itu, untuk alasan yang diberikan dalam MTD R&R dan juga di sidang pengadilan arbitrase Amerika Serikat, hukum Argentina tidak berlaku untuk kasus ini. Akibatnya,

tidak ada batasan hukum yang menghalangi sengketa Mazza dari arbitrase. Sebaliknya dan untuk menegaskan kembali, Federation Arbitration Act menetapkan bahwa untuk tidak meninggalkan tempat untuk pelaksanaan diskresi oleh pengadilan distrik, melainkan mengamankan bahwa pengadilan distrik akan mengarahkan para pihak untuk melanjutkan ke arbitrase mengenai masalah yang perjanjian arbitrase telah ditandatangani.

Maka dari itu, karena Mazza menolak untuk mematuhi perjanjian arbitrase yang dapat dilaksanakan, Edwin G. Torres memutuskan bahwa mosi untuk memaksa arbitrase harus dikabulkan.

Pengadilan arbitrase Amerika Serikat dapat memberikan anti-suit injunction jika CitiBank menetapkan dua persyaratan ambang batas yaitu: "(1) para pihak sama-sama terlibat dalam gugatan luar negeri dan dalam negeri, dan (2) penyelesaian kasus di hadapan pengadilan yang memerintahkan adalah dispositif dari tindakan yang akan diperintahkan". Selain dua persyaratan ambang ini, ada pembagian wewenang mengenai faktor tambahan apa yang harus dipertimbangkan. Namun demikian, di mana salah satu pihak memulai gugatan pengadilan asing dalam upaya untuk menghindari arbitrase, anti-suit injunction mungkin dirasa langkah yang sangat tepat (*APREnergy, LLC v. First Inv. grp. Corp.*, 88 F. Supp. 3d 1300, 1321 (MD Fla 2015)).

Sedangkan untuk alasan-alasan yang tertuang dalam MTD R&R, CitiBank telah menetapkan dua persyaratan ambang batas. Kebijakan

federal yang kuat untuk menegakkan perjanjian arbitrase, dikombinasikan dengan upaya Mazza untuk menghindari arbitrase dan memanfaatkan sistem pengadilan Argentina, lebih dari cukup untuk membenarkan masuknya anti-suit injunction. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan kasus sebelumnya yaitu *Petrokimia Ibeto Industry Ltd. v. MIT Beffen*, (2007) yang menegaskan perintah arbitrase yang memaksa dan memasukkan anti-suit injunction untuk mencegah litigasi asing dari perjanjian arbitrase yang dapat ditegakkan (*Ibeto Petrochemical Industry Ltd. v. MIT Beffen*, 475 F.3d 56, 64 (2d Cir. 2007)).

Mazza menggunakan argumen yang telah digunakan dalam mosinya untuk menolak mengapa pengadilan arbitrase Amerika Serikat memasukkan anti-suit injunction. Namun, pengadilan arbitrase Amerika Serikat tidak setuju dengan argumen tersebut karena alasan yang diajukan dalam *MTD R&R*. Oleh karena itu, Edwin G. Torres memutuskan bahwa mosi untuk anti-suit injunction harus diterima.

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika sebelumnya telah ditentukan melalui perjanjian internasional yang melibatkan Rusia, atau dengan persetujuan para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Lebih lanjut, jika para pihak sebelumnya telah sepakat dalam suatu perjanjian untuk melimpahkan perselisihan mereka terhadap kompetensi pengadilan asing dan arbitrase komersial internasional yang berlokasi di luar wilayah Rusia, maka ketentuan dari Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (APC) tidak dapat berlaku.

Selain itu, Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (APC) juga menjelaskan siapa saja yang terkena dampak dari tindakan pembatasan asing tersebut, antara lain:

- a) warga negara Rusia dan badan hukum Rusia sehubungan dengan tindakan pembatasan yang diterapkan oleh negara asing, asosiasi negara bagian atau negara asing, serikat pekerja negara bagian atau negara asing, dan lembaga dari negara bagian atau negara asing;
- b) badan hukum asing sehubungan dengan tindakan pembatasan yang diterapkan oleh negara asing, asosiasi negara bagian atau negara asing, serikat pekerja negara bagian atau negara asing, lembaga dari negara bagian atau negara asing, dan dasar untuk menerapkan tindakan tersebut adalah tindakan pembatasan asing yang berkaitan dengan warga negara Rusia dan badan hukum Rusia.

b. Negara dengan Sistem Civil Law

1) Yurisdiksi Rusia

Pada 8 Juni 2020, Rusia resmi mengeluarkan amandemen Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (APC) terkait anti-suit injunction. Amandemen tersebut menambahkan Art. 248.1 dan Art.248.2 yang mengatur tentang exclusive jurisdiction dan anti-suit injunction. Art.248.1 menjelaskan bahwa exclusive jurisdiction pengadilan arbitrase di Rusia mencakup kasus-kasus berikut:

- a) perselisihan yang melibatkan orang-orang dengan penerapan tindakan pem-

batasan oleh negara asing, asosiasi negara bagian atau negara asing, serikat pekerja negara bagian atau negara asing, dan lembaga dari negara bagian atau negara asing;

- b) perselisihan satu warga negara Rusia dengan orang asing, jika dasar perselisihan tersebut adalah tindakan pembatasan yang diberlakukan oleh negara asing, asosiasi negara bagian atau negara asing, serikat pekerja negara bagian atau negara asing, dan lembaga dari negara bagian atau negara asing dalam kaitannya dengan warga negara Rusia dan badan hukum Rusia.

Tidak hanya itu, pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan pembatasan asing tersebut berhak untuk melakukan beberapa upaya hukum, antara lain:

- a) mengajukan sengketa ke pengadilan arbitrase subjek Rusia, dengan syarat tidak ada perselisihan antara pihak yang sama dalam proses pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional di luar wilayah Rusia tentang subjek yang sama dan untuk alasan yang sama;
- b) melakukan upaya hukum dengan cara yang ditentukan dalam Art.248.2 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (APC) ini dengan pernyataan yang melarang memulai atau melanjutkan proses hukum di pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional yang terletak di luar wilayah Rusia.

2) Contoh Kasus Anti-Suit Injunction di Rusia (Ural-TransMash v Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA)

Kasus anti-suit injunction pertama kali di Rusia sejak amandemen Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation (APC) yang mulai berlaku pada 19 Juni 2020, adalah kasus yang melibatkan antara JSC Ural Transport Engineering Plant (UralTransMash) dengan Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spylka Akcyjna (PESA). Kasus tersebut diselesaikan melalui Arbitrazh Court of the Sverdlovsk Region di Rusia pada 24 November 2020.

UralTransMash yang merupakan perusahaan asal Rusia mengajukan permohonan anti-suit injunction terhadap Arbitrazh Court of the Sverdlovsk Region, untuk mencegah perusahaan asal Polandia yaitu PESA yang ingin melanjutkan proses hukum di Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). Hal tersebut dikarenakan menurut UralTransMash, amandemen terbaru dari APC seharusnya dapat mencegah PESA dalam mengajukan proses hukum di SCC. Adapun alasan dari PESA yang mengajukan tuntutan terhadap UralTransMash melalui SCC, dikarenakan UralTransMash tidak menepati kewajibannya sesuai dalam perjanjian No. MMI5060/13/0097 untuk pengadaan kendaraan trem di kawasan perkotaan pada tahun 2014-2015 tertanggal 22 Mei 2013.

Pada dasarnya menurut klausul 11.3 dari perjanjian No. MMI5060/13/0097, perselisihan yang timbul dari

pelaksanaan kontrak akan diselesaikan di SCC. Sesuai dengan ketentuan perjanjian tambahan No. 8 tertanggal 7 Mei 2015, yang ditandatangani oleh para pihak dalam kontrak yang ditentukan, klausul 11.3 kontrak diatur sebagai berikut:

"disputes arising from the implementation of this Contract will be resolved at the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce" (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce).

Mengacu pada kinerja UralTransMash yang tidak menepati kewajibannya sesuai perjanjian tersebut dan adanya klausul 11.3, pada 25 September 2018 PESA secara resmi mengajukan permohonan terhadap SCC. Permohonan yang diajukan PESA tersebut, terkait dengan permintaan untuk membentuk arbitrase yang mempertimbangkan perselisihan antara PESA dan UralTransMash tentang pelaksanaan kontrak No. MM/5060/13/0097 tertanggal 22 Mei 2013.

Menurut Art.8 Rules of Arbitration of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, proses arbitrase akan dianggap telah dimulai ketika pada hari SCC menerima permintaan arbitrase. Tuntutan PESA terhadap UralTransMash termuat dalam sengketa No. V 2018 / 114, dipertimbangkan oleh SCC, diatur dalam pernyataan tuntutan 13 Mei 2019 dan dalam paragraf 88, 89 dari gugatan PESA terkait penjelasan tentang masalah yurisdiksi 12 Juli 2019.

Dalam permohonannya, PESA telah menyatakan beberapa gugatan berikut untuk Uraltransmash, antara lain:

- a) pemulihan biaya EUR 18.392.655,85 dari harga yang belum dibayar untuk kendaraan trem No. 37-60, 63, 82, 64-74 dan 79,
- b) pemulihan bunga dengan jumlah sebesar EUR 19.752.941,85 pada nilai yang belum dibayar dari kendaraan trem setiap tahun;
- c) pemulihan bunga dalam jumlah sebesar EUR 18.392.655,85 pada nilai yang belum dibayar dari kendaraan trem No. 37-60, 63, 64-74 dan 79, dihitung untuk periode dari 24 April 2019 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran (saat ini 7% per tahun);
- d) pemulihan biaya EUR 29.706.205.66 karena denda yang ditetapkan oleh perjanjian No. MM/506 0/13/0097 tertanggal 22 Mei 2013, yang dihitung sesuai dengan klausul 7.6 dari perjanjian tersebut;
- e) penagihan bunga yang diperoleh dari 15 Agustus 2018 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran (saat ini 7% per tahun).

Saat ini, pertimbangan sengketa No. V 2018/114 antara PESA dan Uraltransmash di SCC masih belum selesai.

Menurut Hakim, exclusive jurisdiction pengadilan arbitrase Rusia mencakup perselisihan yang melibatkan orang-orang yang tunduk pada tindakan pembatasan, kecuali dengan persetujuan para pihak. Pertimbangan perselisihan tidak mengacupada kompeten-

si pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional, kecuali dalam hal perjanjian tentang klausul arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena penerapan tindakan pembatasan (sanksi) terhadap salah satu pihak.

Dengan demikian, Art. 248.1 dari Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation menetapkan exclusive jurisdiction pengadilan arbitrase di Rusia dalam perselisihan yang melibatkan orang-orang yang dikenai tindakan pembatasan, dalam dua kasus:

- a) dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak tentang pengalihan sengketa untuk dipertimbangkan oleh pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional (Section 1 Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation);
- b) di hadapan perjanjian semacam itu, jika ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tindakan pembatasan yang menciptakan hambatan terhadap akses ke keadilan (Section 4 Art.248 dari Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation).

Maka dari itu Hakim menyatakan bahwa, dalam konteks kesepakatan untuk merujuk sengketa ke arbitrase komersial internasional yang menerapkan Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation, suatu pihak ketika mengajukan klaim yang sesuai ke pengadilan arbitrase negara, wajib membuktikan keadaan-keadaan yang menurut pendapatnya menimbulkan hambatan bagi keadilan, menghalangi penye-

lesaian sengketa di pengadilan arbitrase, dan tidak memungkinkan pelaksanaan hak arbitrase atas klausul sengketa dalam perjanjian.

Pada saat yang sama, Art.248.2 dari Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation juga telah menetapkan prosedur untuk mempertimbangkan permohonan larangan memulai atau melanjutkan proses hukum di pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional yang terletak di luar wilayah Federasi Rusia, pada perselisihan yang ditentukan dalam Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation. Persyaratan untuk permohonan gugatan yang ditetapkan dalam Section 2(4) Art.248.2 dari Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation, yang menurut Hakim pernyataan larangan harus menunjukkan keadaan yang menegaskan exclusive jurisdiction pengadilan arbitrase di Rusia untuk mempertimbangkan perselisihan. Hal tersebut termasuk keadaan yang menegaskan bahwa perjanjian para pihak, yang mempertimbangkan perselisihan dengan partisipasi mereka mengacu pada kompetensi pengadilan asing atau arbitrase komersial internasional yang terletak di luar wilayah Rusia, dan tidak dapat dieksekusi oleh pihak yang bersengketa, serta bersifat umum, yaitu mengacu pada kasus-kasus yang diatur dalam Section 1 Art.248.1 Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation.

Sedangkan di sisi Ural-TransMash, percaya bahwa gugatan No. V 2018/114 antara PESA dan Uraltransmash tentang pelaksanaan perjanjian No. MM/5060/13/0097 ter-

tanggal 22 Mei 2013, berada dalam *exclusive jurisdiction* pengadilan arbitrase Rusia berdasarkan Art.248.1 dari *Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation*, diterapkan ke pengadilan arbitrase ini dengan permohonan untuk melarang PESA untuk melanjutkan proses hukum di hadapan *Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce*, juga meminta pengadilan arbitrase dalam kasus non-eksekusi putusan pengadilan tentang larangan untuk melanjutkan proses hukum di *Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce* dalam gugatan No. V 2018/114, dalam waktu 14 hari sejak berlakunya keputusan ini.

Sebagai tambahan dalam permohonan anti-suit injunction, UralTransMash menunjuk ke tindakan pembatasan yang diterapkan oleh negara-negara asing dan asosiasi negara bagian (*regional*) sehubungan dengan Uraltransmash. Sebagaimana yang diketahui, UralTransMash termasuk dalam daftar konsolidasi organisasi kompleks industri pertahanan, daftar organisasi strategis, serta daftar perusahaan tulang punggung Rusia. Pemegang saham utama Uraltransmash, yang memiliki lebih dari 99% saham kepemilikan perusahaan adalah *Research and Production Corporation Uralvagonzavod JSC*. Maka dari itu, UralTransMash adalah bagian usaha dari Uralvagonzavod JSC, yang pada gilirannya, merupakan bagian dari *Rostec State Corporation*. Saat ini, UralTransMash tunduk pada tindakan pembatasan berikut yang diterapkan oleh negara-negara asing dan asosiasi negara bagian (*regional*).

3) Yurisdiksi Republik Rakyat China

Aturan resmi terkait anti-suit injunction yang berlaku di Republik Rakyat China dapat dilihat dari Article 100 dari *Civil Procedure Law of the People's Republic of China 1991* yang dinyatakan sebagai berikut:

"In the event that the judgment on the case may become impossible to enforce or such judgment may cause damage to a party because of the conduct of the other party to the case or because of any other reason, the people's court may, upon the request of the said party, order the preservation of the property of the other party, specific performance or injunction; in the absence of such request, the people's court may, where it deems necessary, may also order property preservation measures.

When a people's court adopts any preservation measure, it may order the applicant to provide security; where the party refuses to provide such security, the court shall reject the application."

Berdasarkan dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Republik Rakyat China dapat membuat keputusan untuk membatasi pihak Tergugat dalam mengajukan proses hukum ke pengadilan asing, jika tindakan tersebut dapat membuat pelaksanaan putusan Pengadilan Republik Rakyat China menjadi sulit atau menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Selain itu, Pengadilan Republik Rakyat China juga diketahui memiliki aturan khusus untuk mengeluarkan anti-suit injunction dalam sengketa di bidang maritim. Aturan

tersebut dapat terlihat jelas dalam Article 5 dari Special Maritime Procedure Law of the People's Republic of China 1999 yang dinyatakan sebagai berikut:

"A maritime injunction means the compulsory measures adopted on the application of a maritime claimant by the maritime court to compel the person against whom a claim is made to do or not to do certain things, so as to prevent the lawful rights and interest of the claimant from being infringed upon."

Lebih lanjut, Article 53 dari Special Maritime Procedure Law of the People's Republic of China 1999 menjelaskan bahwa anti-suit injunction yang dikeluarkan oleh Pengadilan Republik China tidak dibatasi oleh perjanjian yurisdiksi atau perjanjian arbitrase yang disepakati antara para pihak sehubungan dengan klaim sengketa bidang maritim. Tidak hanya itu, Article 56 dari Special Maritime Procedure Law of the People's Republic of China 1999 bahkan menjelaskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan anti-suit injunction, antara lain yaitu:

- a) Pihak Pemohon harus memiliki klaim tertentu dalam sengketa bidang maritim;
- b) Adanya kepentingan untuk memperbaiki tindakan pihak Tergugat yang melanggar hukum atau melanggar perjanjian;
- c) Adanya situasi darurat yang berpotensi memunculkan atau menambah kerugian dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat jika tidak segera menerapkan anti-suit injunction.

Namun, berdasarkan laporan dari World Trade Organization (WTO) tertanggal 22 Februari 2022, sejauh ini hanya ada empat kasus anti-suit injunction yang semuanya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah diputuskan oleh Pengadilan Republik Rakyat China (WTO, 2022: 1). Empat kasus tersebut yaitu *Xiaomi v Inter Digital, Inc* tahun 2020, *ZTE v Conversant* tahun 2020, *Oppo v Sharp* tahun 2020, dan *Samsung v Ericsson* tahun 2021 (WTO, 2022: 2-3).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Anti-suit injunction merupakan perintah yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan arbitrase untuk menahan pihak lawan dalam memulai atau mempertahankan proses paralel di pengadilan asing atau arbitrase lain. Perintah tersebut dapat ditujukan terhadap pihak-pihak tertentu, baik perseorangan maupun badan hukum. Pada dasarnya, anti-suit injunction bukan ditujukan terhadap pengadilan asing dan/atau pengadilan arbitrase lain, dikarenakan tidak bertujuan untuk mempertanyakan kompetensi pengadilan asing dan/atau pengadilan arbitrase lain. Anti-suit injunction didasarkan pada kompetensi pengadilan arbitrase yang mengeluarkan perintah tersebut, yang dihasilkan dari hukum atau kesepakatan para pihak, atau keadaan lain yang memiliki relevansi hukum dan faktual untuk persidangan tertentu di pengadilan arbitrase tersebut. Tujuan dari anti-suit injunction adalah sebagai salah satu cara untuk memerangi salah satu pihak yang menyalahgunakan hak-hak prosedural mereka melalui

proses paralel yang tidak adil bagi pihak lain di pengadilan asing untuk mempersulit atau tidak memungkinkan pertimbangan pengadilan sebelumnya di masa depan. Pertimbangan para arbitrator pada permohonan anti-suit injunction dalam penyelesaian suatu sengketa didasarkan pada 3 hal, yaitu seat of arbitration (lex loci arbitri), exclusive jurisdiction, dan pendapat ahli hukum dari kasus terdahulu. Pemilihan suatu pengadilan arbitrase sebagai 'place' atau 'seat' of arbitration dalam perjanjian arbitrase para pihak merupakan faktor penting dalam setiap permohonan anti-suit injunction, agar pengadilan arbitrase dapat mengeluarkan anti-suit injunction untuk menahan potensi pelanggaran di dalam perjanjian arbitrase. Para arbitrator juga dapat mengeluarkan anti-suit injunction terhadap salah satu pihak, jika terbukti melanggar ketentuan klausul exclusive jurisdiction dalam perjanjian arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk mengikuti yurisdiksi negara tertentu ketika suatu sengketa telah muncul. Tidak hanya itu, pendapat dari ahli hukum pada kasus terdahulu juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para arbitrator, dikarenakan doktrin-doktrin penting terkait syarat dan penerapan anti-suit injunction yang dikeluarkan oleh ahli hukum pada kasus terdahulu.

- b. Berdasarkan dari empat kasus yang diteliti dari empat negara yang berbeda (Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan China), dapat disimpulkan bahwa permohonan anti-suit injunctions di setiap yurisdiksi negara memiliki pertimbangan yang berbeda. Terlebih dari empat kasus tersebut, terdapat putusan yang menerima ataupun menolak permohonan terhadap anti-suit injunction. Tiga dari empat kasus yang berada di bawah yurisdiksi Inggris, Amerika Serikat, dan China telah menerima permohonan anti-suit

injunction dikarenakan pihak lawan terbukti melanggar perjanjian arbitrase para pihak khususnya exclusive jurisdiction clause, serta mengajukan proses litigasi asing yang memberatkan pihak pemohon. Sedangkan, satu kasus dibawah yurisdiksi Rusia menolak permohonan anti-suit injunction dikarenakan para hakim menemukan beberapa fakta di lapangan yang bertentangan dengan argumen hukum dari pihak pemohon. Penerapan anti-suit injunction memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian komersial internasional yang melibatkan arbitrase komersial internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak. Hal tersebut dikarenakan penerapan anti-suit injunction dapat mencegah pihak lawan untuk melanjutkan proses litigasi asing yang memberatkan pihak lainnya.

2. Saran

Berdasarkan dari pembahasan permasalahan dan simpulan yang telah disampaikan penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dari permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Perlunya kesadaran dan pemahaman hukum para pihak dalam membuat perjanjian komersial internasional yang melibatkan arbitrase komersial internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa, khususnya ketika memasukkan exclusive jurisdiction clause di dalam perjanjian tersebut. Para pihak harus memahami terlebih dahulu konsekuensi dari pemilihan yurisdiksi suatu negara dalam exclusive jurisdiction clause, karena jika dilanggar maka akan menimbulkan sengketa baru yang pada akhirnya salah satu pihak harus mengajukan permohonan anti-suit injunction kepada lembaga arbitrase internasional di bawah yurisdiksi negara yang telah disepakati dalam perjanjian komersial internasional. Demi mencegah hal tersebut terjadi, para

pihak dapat mempelajari terlebih dahulu hukum nasional para pihak yang mengatur penegakan dan pelaksanaan suatu perjanjian arbitrase maupun putusan dari lembaga arbitrase, sebelum memasukkan *exclusive jurisdiction clause* dalam perjanjian komersial internasional mereka.

- b. Berkaca pada beberapa kasus anti-suit injunction yang telah terjadi di sejumlah negara dengan sistem hukum civil law, negara-negara tersebut perlu untuk menyusun aturan alternatif dari pelaksanaan anti-suit injunction demi mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap *exclusive jurisdiction clause* dalam perjanjian arbitrase para pihak. Hal tersebut dikarenakan pada

dasarnya, negara-negara dengan sistem hukum civil law tidak menyetujui penggunaan anti-suit injunction dalam pelaksanaan putusan arbitrase karena bertentangan dengan beberapa prinsip hukum negaranya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kasus pelanggaran terhadap *exclusive jurisdiction clause* makin banyak terjadi di bawah yurisdiksi negara-negara dengan sistem hukum civil law. Sehingga perlu adanya tindak tegas dari negara-negara sistem hukum civil law, dengan cara menerbitkan aturan alternatif dari penggunaan anti-suit injunction demi mengurangi kasus pelanggaran terhadap *exclusive jurisdiction clause*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2009. *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Andrews, Neil. 2016. *Arbitration and Contract Law: Common Law Perspective*. Switzerland: Springer International Publishing.
- A. R, David. 2017. *Williams and Kawharu on Arbitration*. New Zealand: LexisNexis New Zealand.
- Batubara, Suleman dan Purba, Orinton. 2013. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Born, Gary B.. 2014. *International Commercial Arbitration*. New York: Kluwer Law International.
- Blackaby, Nigel dkk. 2015. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. New York: Oxford University Press.
- Caflich, Lucius. 2001. *Cent ans de reglement pacifique des differends interetatiques*. Leiden: RCADI.
- Contreras, Jorge L. dan Eixenberger, Michael A. 2017. *The Anti-Suit Injunction – A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*. Dalam buku *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law – Patent, Antitrust, and Competition Law*. New York: Cambridge University Press.
- Dicey, A.V.. 2012. *Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws*. London: Sweet & Maxwell.
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ingraham, Edward Duncan. 2019. *Condensed Reports of Cases Decided in the High Court of Chancery in England, Vol. 13*. London: Forgotten Books.
- Mardani, 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moses, Margaret L. 2012. *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*. New York: Cambridge University Press.
- Mosimann, Oliver Luc. 2010. *Anti-Suit Injunctions in International Commercial Arbitration*. Den Haag: Eleven International Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Onyema, Emilia. 2010. *International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contract*. New York: Routledge.
- Rajoo, Sundra. 2016. *Law, Practice and Procedure of Arbitration (Second Edition)*. Petaling Jaya: LexisNexis Malaysia.
- Simma, B. dkk. 2012. *The Charter of the United Nations: A Commentary*. New York: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Tanaka, Yoshifumi. 2018. *The Peaceful Settlement of International Disputes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tang, Zheng Sophia. 2014. *Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law*. London: Routledge.
- Zekos, Georgios I. 2008. *International Commercial and Marine Arbitration*. New York: Routledge-Cavendish.

Jurnal

- Ahmed, Mukarrum dan Beaumont, Paul, 2017. "Exclusive Choice of Court Agreements: Some Issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements and Its Relationship With the Brussels I Recast Especially Anti-Suit Injunctions, Concurrent Proceedings and the Implications of BREXIT", *Journal of Private International Law*, Vol. 13 Issue 2.
- Bermann, George A., 1990. "The Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation", *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 28.
- Contreras, Jorge L., 2020. "It's Anti-Suit Injunctions All the Way Down – The Strange New Realities of International Litigation Over Standards-Essential Patents", *IP Litigator*, Vol. 26 No. 4.
- Dewi, Ayu Atika, 2018. "Tarik Ulu Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase (Kajian Terhadap Prinsip *Niet van Openbaar Orde* dan *Pacta Sunt Servanda* dalam Klausul Arbitrase)", *Dialogia Iuridica*, Vol. 9 No. 2.
- Douglas, Michael, "Anti-Suit Injunctions in Australia", *Melbourne University Law Review*, Vol. 41, No.1, 2017, hlm. 1 - 40.
- Dutson, Stuart, 1997. "The Conflict of Laws and Statutes: The International Operation of Legislation Dealing with Matters of Civil Law in the United Kingdom and Australia", *The Modern Law Review*, Vol. 60 No. 5.

- Dutson, Stuart, 2000. "Breach of an Arbitration or Exclusive Jurisdiction Clause: The Legal Remedies if it Continues", *Arbitration International*, Vol. 16 No. 1.
- Dutton, Tyler J., 2013. "Jurisdictional Battles in Both European Union Cross-Border Injunctions and United States Anti-Suit Injunctions", *Emory of International Law Review*, Vol. 27 Issue 2.
- Fisher, Geoffrey, 2010. "Anti-Suit Injunctions to Restrain Foreign Proceedings in Breach of an Arbitration Agreement", *Bond Law Review*, Vol. 22 Issue 1.
- Florescu, Cristina Ioana, 2020. "Emerging Tools to Attract and Increase the Use of International Arbitration", *Juridical Tribune*, Vol. 10 Issue 2.
- Grodl, Lukas, 2021. "England to Become the Prime Jurisdiction for International Commercial Disputes – Anti-Suit Injunction As A Tool for Assurance", *The Lawyer Quaterly*, Vol. 11 No. 2.
- Hartley, Trevor C., 1987. "Comity and the Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 35 No. 3.
- Henderson, Alastair, 2014. "Lex Arbitri, Procedural Law and the Seat of Arbitration", *Singapore Academy Law Journal*, Vol. 26 SAcLJ.
- Hirsch, Gustavo, 2021. "Anti-Suit Injunctions in Patent Litigation: A Race to the Bottom", *Revista de Direito*, Vol. 13 No. 03.
- Karton, Joshua, 2020. "International Arbitration as Comparative Law in Action", *Journal of Dispute Resolution*, Vol. 20 Issue 2 Art. 7.
- Kenny, Chng Wei Yao, 2015. "Breach of Agreement Versus Vexatious, Oppressive and Unconscionable Conduct: Clarifying Their Relationship in the Law of Anti-Suit Injunctions", *Singapore Academy of Law Journal*, Vol. 27 Issue 2.
- Moreno, Ronald B., 2020. "Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration: A Critical Analysis", *UST Law Review*, Vol. 64 March 2020.
- Nguyen, Hieu Huu, 2020. "Impact of Foreign Trade Investment and International Trade on Economic Growth: Empirical Study in Vietnam", *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 7 No. 3.
- Onuzulike, Chimezie, 2021. "An Appraisal of the Concept of Anti-Suit Injunction in International Arbitration", *The Gravitas Review of Business & Property Law*, Vol. 12 No. 3.
- Pamolango, Jessica Tengar, 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa", *Lex Administratum*, Vol. 3 No. 1.
- Pull, Chetan, 2011. "U.S. Anti-suit Injunctions in Support of International Arbitration: Five Questions American Courts Ask", *Journal of International Arbitration*, Vol. 28 No. 1.
- Situmorang, Mosgan, 2017. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4.
- Stipanowich, Thomas J., 2014. "Reflections on the State and Future of Commercial Arbitration: Challenges, Opportunities, Proposals", *The American Review of International Arbitration*, Vol. 25 No. 3-4.
- Strong, S.I., 2018. "Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 66 Issue 1.
- Tang, Zheng Sophia, "Effectiveness of Exclusive Jurisdiction Clauses in The Chinese Courts - A Pragmatic Study", *International & Comparative Law Quaterly*, Vol. 61, Issue 2 2012, hlm. 458 – 484.

Konvensi Internasional

United Nations Charter

Statute of the International Court of Justice 1945

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention).

The Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters 1968

The Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters 1988

The Brussels I Regulation No. 1215/2012 of The European Parliament and of The Council on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters 2012 with amendments as adopted in 2015

Peraturan Perundang-undangan Nasional

The England Supreme Court of Judicature Act 1873

The England Senior Courts Act 1981

The Judiciary Act 1789 (United States)

The US Federal Rule of Civil Procedure 1937, last amended in 2020

The US Federal Arbitration Act 1925, last amended in 2022

Arbitrazh Procedure Code of the Russian Federation No. 70-FZ of May 5, 1995

Civil Procedure Law of the People's Republic of China 1991

Special Maritime Procedure Law of the People's Republic of China 1999

Supreme People's Court's Provisions on Several Issues Concerning the Application of Law in Examining Act Preservation Cases in Intellectual Property Disputes 2019 (People's Republic of China)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus

Aggeliki Charis Compania Maritima SpA v Pagnan SpA ('The Angelic Grace'), 1995, 1 Lloyd's Rep 87, The English Court of Appeal.

APR Energy, LLC v. First Inv. grp. Corp., 2015 88 F. Supp. 3d 1300, 1321 (MD Fla 2015), United States District Court of Middle District of Florida, 11th Circuit. Diakses melalui <https://case-law.vlex.com/vid/APR-Energy-LLC-v-First-Investment-Group-Corporation-022015-FLMDC-3-14-cv-575-J-34JBT-601596206>.

AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 2011, 563 U.S. 333, 339, 131 S. Ct. 1740, 179 L. Ed. 2d 742, United States Supreme Court. Diakses melalui <https://case-law.vlex.com/vid/888219583>.

*Augustin v. Cubesmart, L.P., 2018, US Dist. LEXIS 195925, 2018 WL 6198369, at *2 (SD Fla. 15 November 2018), United States District Court for the Southern District of Florida.*

BallenIsles Country Club, Inc. v. Dexter Realty, 2009, 24 So. 3d 649, 652 (Fla. 4th DCA 2009), District Court of Appeal of Florida, Fourth District. Diakses melalui <https://cite.case.law/so-3d/24/649/>.

Becker v. Davis, (11th Cir. 2007), 491 F.3d 1292, 1298, United States District Court for the Northern District of Florida. Diakses melalui <https://casetext.com/case/becker-v-davis-2>.

Bushby v. Munday, 1814 – 1823, All E.R. Rep. 304, The English High Court of Chancery. Diakses melalui <https://vlex.co.uk/vid/william-bushby-v-james-806354217>.

- CitiBank, N.A. v. Mazza*, 2020, U.S. Dist. LEXIS 25658 (S.D. Fla. February 12, 2020), United States District Court for the Southern District of Florida.
- Cohen v. Rothfield*, 1919, 1 K.B. 410, The English Court of Appeals. https://www.iclr.co.uk/document/1911000072/casereport_79430/html.
- Continental Bank NA v. Aeakos Compania Naviera SA*, 1994, 1 Lloyd's Rep. 505, The English Court of Appeal. Diakses melalui <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=149701>.
- Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd*, 1985, 470 U.S. 213, 218, 105 S. Ct. 1238, 84 L. Ed. 2d 158, United States Supreme Court. Diakses melalui <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/470/213>.
- Dermajaya Properties Sdn Bhd v Premium Properties Sdn Bhd*, 2002, 1 SLR (R) 492, The Singapore Court of Appeal. Diakses melalui <https://docplayer.net/5818424-Dermajaya-properties-sdn-bhd-v-premium-properties-sdn-bhd-and-another.html>.
- Ecobank Transnational Incorporated v Tanoh*, 2015, EWCA 1309, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2015/1309.html&query=\(Ecobank\)+AND+\(Transnational\)+AND+\(v\)+AND+\(Tanoh\)+AND+\(2015.\)+AND+\(EWCA\)+AND+\(1309\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2015/1309.html&query=(Ecobank)+AND+(Transnational)+AND+(v)+AND+(Tanoh)+AND+(2015.)+AND+(EWCA)+AND+(1309)).
- Ecom Agroindustrial Corp Ltd v. Mosharaf Composite Textile Mill Ltd*, 2013, EWHC 1276, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2013/1276.html&query=\(Ecom\)+AND+\(v\)+AND+\(Mosharaf\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2013/1276.html&query=(Ecom)+AND+(v)+AND+(Mosharaf)).
- Evergreen International SA v Volkswagen Group Singapore Pte Ltd*, 2003, SGHC 142, Singapore High Court. Diakses melalui https://www.elitigation.sg/gdviewer/s/2003_SGHC_142.
- Ever Judger Holding Co Ltd v Kroman Celik Sanayii Anonim Sirketi*, 2015, 3 HKC 246, The Hongkong Court of First Instance. Diakses melalui https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.jsp?DIS=98020&QS=%24%26%2340%3B%2CJudger%2CHolding%2CCo%2CLtd%2Cv%2CKroman%2CCelik%2CSanayii%2CAnonim%2CSirketi%2C%26%2340%3B%2015%26%2341%3B%2C3%2CHKC%2C246%26%2341%3B&ID=AAAB73AADAAQJeAAI&TP=JU.
- First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan*, 1995, 514 U.S. 938, 944, 115 S. Ct. 1920, 131 L. Ed. 2d 985, United States Supreme Court. Diakses melalui <https://www.law.cornell.edu/supct/html/94-560.ZO.html>.
- Forum Insurance Co., Inc. v Bristol Myers Squibb. Co*, 1996, 929 S.W. 2d 114, Court of Appeals of Texas. Diakses melalui <https://casetext.com/case/forum-ins-v-bristol-myers-squibb>.
- Ibeto Petrochemical Industry. Ltd. v. MIT Beffen*, 2007, 475 F.3d 56, 64 (2d Cir. 2007), United States District Court for the Southern District of New York. Diakses melalui <https://casetext.com/case/ibeto-v-mt-beffen>.
- Impala Warehousing and Logistics (Shanghai) Co. Ltd v Wanxiang Resources (Singapore) PTE. Ltd*, 2015, 2 ER 234, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui <https://17kbw.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/Impala-v-Wanxiang-2014-FOLIO-1109-2.pdf>.
- In Re Harrods (Buenos Aires) Ltd*, 1992, Ch 72 (CA), The English Court of Appeal. Diakses melalui <http://www.uniset.ca/lloyddata/css/1992Ch72.html>.
- Johnson v. Agnew*, 1980, AC 367, The English House of Lords. Diakses melalui <https://www.coursehero.com/file/89916030/Johnson-v-Agnew-1980-pdf/>.
- Klay v. All Respondent*, (11th Cir. 2004), 389 F.3d 1191, 1200, United States Court of Appeals (11th Circuit). Diakses melalui <https://case-law.vlex.com/vid/389-f-3d-1191-597419570>.
- Magnolia Capital Advisors, Inc. v. Bear Stearns & Co.*, (11th Cir. 2008), 272 F. App'x 782, 785, United States District Court for the Northern District of Florida. Diakses melalui <https://casetext.com/case/magnolia-capital-v-bear-stearns>.

- Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*, 1985, 473 U.S. 614, 638-40, 105 S. Ct. 3346, 87 L. Ed. 2d 444, United States Supreme Court. Diakses melalui <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/473/614>.
- Mobile Telecommunications Company Ltd v Abdulaziz*, 2018, EWHC 1469, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1469.html&query=\(Mobile\)+AND+\(Telecommunication\)+AND+\(v\)+AND+\(Abdulaziz\)+AND+\(.2018.\)+AND+\(EWHC\)+AND+\(1469\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1469.html&query=(Mobile)+AND+(Telecommunication)+AND+(v)+AND+(Abdulaziz)+AND+(.2018.)+AND+(EWHC)+AND+(1469)).
- Moses H. Cone Mem'l Hosp. v. Mercury Constr. Corp.*, 1983, 460 U.S. 1, 24, 103 S. Ct. 927, 74 L. Ed. 2d 765, United States Supreme Court. Diakses melalui <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/460/1>.
- National Navigation Co v. Endesa Generacion SA (The "Wadi Sudr")*, 2010, 1 Lloyd's Rep.193, The English Court of Appeal. Diakses melalui <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=242540>.
- Nori Holdings Ltd & Ors v. Public Joint – Stock Company 'Bank Otkritie Financial Corporation'*, 2018, EWHC 1343, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1343.html&query=\(Nori\)+AND+\(Holdings\)+AND+\(Ltd\)+AND+\(.2018.\)+AND+\(EWHC\)+AND+\(1343\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1343.html&query=(Nori)+AND+(Holdings)+AND+(Ltd)+AND+(.2018.)+AND+(EWHC)+AND+(1343)).
- Parks IP Law, LLC v. Wood*, (11th Cir. 2018), 755 F. App'x 884, 888, United States District Court for the Northern District of Georgia. Diakses melalui <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca11/18-11178/18-11178-2018-11-08.html>.
- PT Garuda Indonesia v Birgen Air*, 2002, 1 SLR (R) 401, The Singapore Court of Appeal. Diakses melalui <https://docplayer.net/32277831-Pt-garuda-indonesia-v-birgen-air.html>.
- Qingdao Huiquan Shipping Company v Shanghai Dong He Xin Industry Group Co Ltd*, 2018, EWHC 3009, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/3009.html&query=\(Qingdao\)+AND+\(v\)+AND+\(Shanghai\)+AND+\(Dong\)+AND+\(.2018.\)+AND+\(EWHC\)+AND+\(3009\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2018/3009.html&query=(Qingdao)+AND+(v)+AND+(Shanghai)+AND+(Dong)+AND+(.2018.)+AND+(EWHC)+AND+(3009)).
- RiverRock Securities Ltd v. International Bank of St. Petersburg (Joint Stock Co)*, 2020, EWHC 3324, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/2483.html&query=\(RiverRock\)+AND+\(Securities\)+AND+\(Ltd\)+AND+\(v.\)+AND+\(International\)+AND+\(Bank\)+AND+\(of\)+AND+\(St.\)+AND+\(Petersburg\)+AND+\(Joint\)+AND+\(Stock\)+AND+\(Co\)\)+AND+\(.2020.\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/2483.html&query=(RiverRock)+AND+(Securities)+AND+(Ltd)+AND+(v.)+AND+(International)+AND+(Bank)+AND+(of)+AND+(St.)+AND+(Petersburg)+AND+(Joint)+AND+(Stock)+AND+(Co))+AND+(.2020.)).
- Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. Lee Kui Jak*, 1987, A.C. 871, The English Judicial Committee of the Privy Council. Diakses melalui https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1987/1987_12.html.
- The Eleftheria*, 1969, 1 Lloyd's Rep. 237, The English Court of Appeal. Diakses melalui <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=146249>.
- The Jay Bola*, 1997, 2 Lloyd's Rep. 279, The English Court of Appeal. Diakses melalui <https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=150950#LLR:1997020279>.
- Times Trading Corporation v National Bank of Fujairah*, 2020, EWHC 1078, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1078.html&query=\(Times\)+AND+\(Trading\)+AND+\(Corporation\)+AND+\(v\)+AND+\(National\)+AND+\(Bank\)+AND+\(of\)+AND+\(Fujairah\)+AND+\(.2020.\)+AND+\(EWHC\)+AND+\(1078\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1078.html&query=(Times)+AND+(Trading)+AND+(Corporation)+AND+(v)+AND+(National)+AND+(Bank)+AND+(of)+AND+(Fujairah)+AND+(.2020.)+AND+(EWHC)+AND+(1078)).
- UAU v. HVB*, 2021, EWHC 1548, The England & Wales Commercial Court. Diakses melalui [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2021/1548.html&query=\(uau\)+AND+\(v\)+AND+\(hvb\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2021/1548.html&query=(uau)+AND+(v)+AND+(hvb)).
- UralTransMash v Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA*, 2020, Case No. 60-36897/2020, Arbitration Court of the Sverdlovsk Region. Diakses melalui <https://jusmundi.com/en/document/decision/>

ru-pojazdy-szynowe-pesa-bydgoszcz-sa-v-uraltransmash-opredelenie-arbitrazhnyi-sud-verdlovskoi-oblasti-tuesday-24th-november-2020#decision_19276.

Wallshein v. Shugarman, 2010, 50 So. 3d 89, 90 (Fla. 4th DCA 2010), District Court of Appeal of Florida, Fourth District. Diakses melalui <https://cite.case.law/so-3d/50/89/>.

Xiaomi v Inter Digital, Inc., 2020, E 01 Zhi Min Chu No.169, Wuhan Intermediate People's Court of the People's Republic of China. Diakses melalui <https://patentlyo.com/media/2020/10/Xiaomi-v-InterDigital-decision-trans-10-17-2020.pdf>.

Website dan Pustaka Maya

Angualia Daniel, 2010. "The Role of Domestic Courts in International Commercial Arbitration", SSRN Electronic Journal, hlm. 1-30. (<https://ssrn.com/abstract=1674760>, diakses tanggal 10 Agustus 2021 pukul 20.17 WIB).

John James Barcelo, 2017. "Kompetenz-Kompetenz and Its Negative Effect – A Comparative View", Cornell Legal Studies Research Paper, No. 17 – 40. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035485, diakses tanggal 13 Juni 2022 pukul 15.21)

UNCITRAL Secretariat, 2016. The Guide: 1958 New York Convention Guide, New York Arbitration Convention. (https://newyorkconvention1958.org/index.php?l=cmspage&pageid=10&menu=729&opac_view=-1/ diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 21.54 WIB).

UNCITRAL, 2014. UNCITRAL Arbitration Rules, United Nations Commission On International Trade Law. (<https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration>, diakses pada 2 Agustus pukul 23.12 WIB).

WTO, 2022. China – Enforcement of Intellectual Property Rights – Request for Consultations by the European Union, World Trade Organization. (https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=282896,282897,282898,282500&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True).